

**PENGARUH KOMITE SEKOLAH TERHADAP PENINGKATAN BAKAT
SISWA PADA BIDANG STUDI PAI DI SDN NO. 207 TARIPA
KECAMATAN ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR**



IAIN PALOPO
ZUHRUL AIN
NIM 06.19.2.0085

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM JURUSAN TARBİYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PALOPO**

2 0 1 1

**PENGARUH KOMITE SEKOLAH TERHADAP PENINGKATAN BAKAT
SISWA PADA BIDANG STUDI PAI DI SDN NO. 207 TARIPA
KECAMATAN ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I.)

Oleh,

ZUHRUL AIN
NIM 06.19.2.0085

IAIN PALOPO Di bawah Bimbingan :

1. Dra. Hj. Ramlah Makkulasse, MM
2. Drs. Nurdin K, M.Pd.

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM JURUSAN TARBIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PALOPO**

2 0 1 1

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ZUHRUL AIN**
NIM : 06.19.2.0085
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Jurusan : Tarbiyah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

IAIN PALOPO Palopo, 10 Mei 2011

Penyusun,

ZUHRUL AIN
NIM 06.19.2.0085

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul : *Pengaruh Komite Sekolah terhadap Peningkatan Bakat Siswa pada Bidang Studi PAI di SDN No. 207 Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur*

Yang ditulis oleh :

Nama : ZUHRUL AIN
NIM : 06.19.2.0085
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Jurusan : Tarbiyah

Disetujui untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Palopo, 10 Mei 2011

Pembimbing I

Pembimbing II

IAIN PALOPO

Dra. Hj. Ramlah Makkulasse, MM
Nip. 19610208 199403 2 001

Drs. Nurdin K, M.Pd.
Nip. 19681231 199903 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi
Lamp. : 6 Eksamplar

Palopo, 19 Mei 2011

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Tarbiyah STAIN Palopo
Di -
P a l o p o

Assalamu' Alaikum Wr. Wb.

Sesudah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **ZUHRUL AIN**
NIM : 06.19.2.0085
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Judul Skripsi : ***Pengaruh Komite Sekolah terhadap Peningkatan Bakat Siswa pada Bidang Studi PAI di SDN No. 207 Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur***

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

STAIN PALOPO

Pembimbing I

Dra. Hj. Ramlah Makkulasse, MM
Nip. 19610208 199403 2 001

P R A K A T A

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين.

Puji dan syukur kehadiran Allah swt, atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam bentuk yang sederhana. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari aspek metodologisnya maupun pembahasan substansi permasalahannya.

Dalam proses penyusunan penulis banyak mendapatkan bantuan bimbingan, dorongan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang setingginya-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Nihaya M., M.Hum., selaku Ketua STAIN Palopo, periode 2010/2014 yang senantiasa membina di mana penyusun menimba ilmu pengetahuan.
2. Prof. Dr. H. M. Said Mahmud, Lc., M.A., selaku mantan Ketua STAIN Palopo, periode 2006/2010 yang senantiasa membina di mana penyusun menimba ilmu pengetahuan.
3. Drs. Hasri, MA., selaku Ketua Jurusan Tarbiyah, dan Sekertaris Jurusan Tarbiyah, Drs. Nurdin K., M.Pd., yang telah banyak membantu di dalam menyelesaikan studi selama mengikuti pendidikan di STAIN Palopo.
4. Dra. Hj. Ramlah Makkulasse, MM selaku Pembimbing I dan Dra. Nurdin K, M.Pd. Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk membimbing dan

mengarahkan penulis dalam proses penyusunan skripsi, sehingga dapat terselesaikan sesuai dengan rencana.

5. Kepala perpustakaan beserta karyawan dan karyawan STAIN, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

6. Sumardi, S.Pd., selaku Kepala SDN No. 207 Taripa beserta guru dan stafnya yang dengan senang hati menerima penulis dalam proses pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini.

7. Kepada kedua orang tua tercinta yang telah memelihara dan mendidik sejak lahir hingga dewasa dengan penuh pengorbanan lahir dan batin.

8. Kepada semua saudara-saudaraku dan teman-teman yang tidak sempat disebutkan namanya satu per satu, yang telah banyak memberikan dukungan baik moril maupun materil.

Akhirnya hanya kepada Allah swt., penulis berdo'a semoga bantuan dan partisipasi berbagai pihak dapat diterima sebagai ibadah dan diberikan pahala yang berlipat ganda, dan semoga skripsi ini berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, Amin

IAIN PALOPO

Palopo, 10 Mei 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman :

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Komite Sekolah.....	9
B. Pemberdayaan Komite Sekolah	11
C. Bakat Siswa dalam Proses Pembelajaran.....	16
D. Peranan Siswa dalam Proses Belajar Mengajar	22
E. Kerangka Pikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Desain Penelitian.....	28
B. Populasi dan Sampel	28
C. Instrumen Penelitian.....	29
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Teknik Analisis Data.....	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Deskripsi Hasil Penelitian	33
B. Pengaruh Komite Sekolah terhadap Peningkatan Bakat Siswa pada Bidang Studi Pendidikan Agama Islam di SDN Taripa Kecamatan Angkona	41
C. Proses Penetapan Kebijakan Kurikulum di SDN No. 207 Taripa Kecamatan Angkona	50
D. Pengaruh Komite Sekolah dalam Proses Penetapan Kebijakan di SDN No. 207 Taripa Kecamatan Angkona.....	56
 BAB V PENUTUP	 63
A. Kesimpulan	63
B. Saran-saran.....	64
 DAFTAR PUSTAKA	 66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



IAIN PALOPO

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Keadaan Guru dan Pegawai SDN No. 207 Taripa Tahun Ajaran 2010/2011.....	37
Tabel 4.2	Kondisi Pengurus Komite Sekolah SDN No. 207 Taripa Tahun 2010/2011	38
Tabel 4.3	Keadaan Keseluruhan Siswa SDN No. 207 Taripa Tahun Pelajaran 2010/2011.....	39
Tabel 4.4	Sarana dan Prasarana SDN No. 207 Taripa Tahun Ajaran 2010/2011.....	40
Tabel 4.5	Tanggapan Siswa terhadap Keberadaan Komite Sekolah di SDN No. 207 Taripa	41
Tabel 4.6	Tanggapan Siswa terhadap Peran Komite Sekolah dalam Peningkatan Bakat Siswa pada Bidang Studi PAI.....	43
Tabel 4.7	Tanggapan Siswa terhadap Pelaksanaan Peran dan Fungsi Komite Sekolah dalam Peningkatan Bakat Siswa pada Bidang Studi PAI	44
Tabel 4.8	Apakah Komite Sekolah Mempunyai Pengaruh yang Positif bagi Proses Pendidikan Agama Islam di Sekolah.....	45
Tabel 4.9	Apakah Keberadaan Komite Sekolah Mampu Memberikan Dukungan terhadap Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam	47
Tabel 4.10	Apakah Komite Sekolah Sebagai Pengawas Proses Pendidikan Agama Islam di Sekolah	48
Tabel 4.11	Apakah Komite Sekolah Mampu Memberikan Pengaruh Terhadap Kinerja Para Pelaku Pendidikan di Sekolah.....	57
Tabel 4.12	Apakah Komite Sekolah dalam Melaksanakan Fungsinya Sebagai Pengawas dalam Memberikan Pengaruh Terhadap Kinerja para Pelaku Pendidikan di Sekolah.....	59
Tabel 4.13	Apakah Pelaksanaan Fungsi dan Tanggung Jawab Komite Sekolah Sesuai dengan Aturan dan Ketentuan yang Berlaku untuk para Pelaksana Komite Sekolah.....	60

ABSTRAK

Ain, Zuhrlul, 2011. “Pengaruh Komite Sekolah terhadap Peningkatan Bakat Siswa pada Bidang Studi PAI di SDN No. 207 Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur”. Skripsi Program Studi Pendidikan Agama Islam, Jurusan Tarbiyah. Pembimbing (I) Dra. Hj. Ramlah M., MM, dan Pembimbing (II) Drs. Nurdin Kaso, M.Pd.

Kata Kunci: Pengaruh Komite Sekolah, Peningkatan Bakat Siswa, Bidang Studi Pendidikan Agama Islam

Skripsi ini membahas Pengaruh Komite Sekolah terhadap Peningkatan Bakat Siswa pada Bidang Studi PAI di SDN No. 207 Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur di mana penelitian ini memadukan berbagai macam metode dalam penelitian dikaji dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan penilaian tertentu yang merefleksikan persepsi tersebut.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan berbagai macam alternatif jawaban dari objek yang dikaji, yakni wawancara, observasi, dokumentasi dan angket, kemudian selanjutnya keseluruhan data tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu data yang dikumpulkan dan diolah secara kualitatif dengan menggunakan tabel-tabel sederhana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite sekolah sebagai lembaga yang terbentuk dari luar sekolah dan bukan merupakan suatu lembaga formal yang menjadi lembaga penentu terhadap proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah, akan tetapi komite sekolah dalam hal ini adalah mempunyai pengaruh dan tanggungjawab yang lewat pengawasan praktis terhadap pelaku pendidikan termasuk didalamnya peningkatan bakat siswa pada bidang studi Pendidikan Agama Islam dan dari masing-masing pelaku pendidikan, dengan demikian pengaruh komite sekolah dalam peningkatan bakat siswa di SDN No. 207 Taripa sudah berjalan dengan efektif, tinggal peningkatan yang lebih signifikan guna menunjang dari program kerja yang telah diterapkan di sekolah tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa dan merupakan wahana dalam menerjemahkan pesan-pesan konstitusi serta sarana dalam membangun watak bangsa. Masyarakat yang cerdas akan memberi nuansa kehidupan yang cerdas pula, dan secara progresif akan membentuk kemandirian. Globalisasi informasi dan transformasi adalah era kompetisi secara sehat yang ditandai dengan berbagai persaingan, khususnya dalam dunia pendidikan. Kondisi inilah yang mendesak bagaimana sekolah-sekolah sebagai lembaga pendidikan formal mengambil peran pada era ini, melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Adapun keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044 1U/202 tanggal 2 April 2002.

Pembinaan sistem sekolah sebagai sub sistem dan pendidikan pra sekolah dalam sistem Pendidikan Nasional pada dasarnya diarahkan pencapaian tujuan nasional. Dalam Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2003, disebutkan tujuan pendidikan nasional yaitu:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹

Sebagai sub sistem pendidikan, satuan pendidikan yang disebut sebagai sekolah perlu dikelola dengan menggunakan parameter kebijakan nasional, yaitu: (1) pemerataan layanan pendidikan, (2) peningkatan kualitas pendidikan, (3) relevansi pendidikan, (4) efisiensi penyelenggaraan pendidikan dalam latar belakang wawasan nusantara dan memperhatikan kecenderungan perubahan di masa depan.²

Secara empirik satuan pendidikan lahir sebagai jawaban kebutuhan belajar/pendidikan yang tumbuh di masyarakat sehingga eksistensinya menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga.³

Oleh karena itu, terbentuknya wadah sekolah yang cenderung didasarkan pada kesamaan motif, maka sekolah sebagai salah satu institusi formal harus memperhatikan adanya variabel-variabel, yakni: (1) dimensi-dimensi individu, (2) struktur yang mekanisme kegiatan, (3) dinamika kelompok untuk mewujudkan lembaga fungsional dan antar personal, (4) tujuan yang jelas mengendalikan semua kegiatan kelompok, dan (5) kebutuhan masyarakat.⁴

Sistem pendidikan yang selama ini dikelola dalam suatu iklim birokratik dan sentralistikl dianggap sebagai salah satu sebab yang telah membuahkan

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, No. 22 Tahun 2003 dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 33.

² Wahid Nurkencana, *Evaluasi Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1996), h. 89.

³ Ametembun, N.A., *Guru dalam Administrasi Sekolah, Pembangunan*, (Bandung: IKIP Bandung, 1989), h. 51.

⁴ Burhanuddin, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1989), h. 79.

keterpurukan dalam mutu dan keunggulan pendidikan di tanah air.⁵ Dengan demikian merekalah yang seharusnya menjadi pelaku utama dalam membangun pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakatnya.⁶ Kepala sekolah dapat berunding dengan masyarakat untuk memecahkan berbagai persoalan pendidikan bersama-sama termasuk mengatasi kekurangan sarana prasarana pendidikan.⁷

Penyederhanaan konsep masyarakat itu dilakukan melalui perwakilan fungsi *stakeholder*, dengan jalan membentuk Komite Sekolah pada setiap sekolah. Komite Sekolah sedapat mungkin bisa mempresentasikan keragaman yang ada agar benar-benar dapat mewakili masyarakat. Dengan demikian, interaksi antara sekolah dan masyarakat dapat diwujudkan melalui mekanisme pengambilan keputusan antar sekolah-sekolah dengan Komite Sekolah. Bukti tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan diwujudkan dalam fungsi yang melekat pada Komite Sekolah yaitu fungsi pemberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan, fungsi kontrol dan akuntabilitas publik, fungsi pendukung serta fungsi mediator antara sekolah dengan masyarakat dengan masyarakat yang diwakilinya. Kemandirian setiap satuan pendidikan adalah salah satu dna kebijakan desentralisasi pendidikan sehingga sekolah-sekolah menjadi lembaga yang otonom dengan sendirinya. Sesuai dengan strategi ini sekolah bukan bawahan dari birokrasi pemerintah daerah tetapi sebagai

⁵ Dirjen Dikti, *UUD 1945*, (Jakarta: 1988), h. 156.

⁶ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, (Konsep, Strategi dan Implementasi)*, (Bandung: Rosda Karya, 2002), h. 28.

⁷ Nurcholis, *Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model, dan Aplikasi*, (Jakarta: Gramedia, 2003), h. 42.

lembaga profesional yang bertanggung jawab terhadap klien yang diwakili oleh Komite Sekolah. Perlu juga dipahami bahwa pengembangan Badan Pembantu Pelaksanaan Pendidikan (BP3) terbukti tidak berhasil mobilisasi partisipasi dan tanggung jawab masyarakat. Tetapi yang harus lebih dipahami adalah fungsi Komite Sekolah sebagai jembatan antara sekolah dan masyarakat. Sekolah yang hanya terbatas personalianya, akan sangat dibantu jika dibuka kesempatan bagi masyarakat luas untuk ikut memikirkan pendidikan di sekolah-sekolah.⁸

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia di mana berbagai permasalahan hanya dapat dipecahkan kecuali dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain manfaat bagi kehidupan manusia di satu sisi perubahan tersebut juga telah membawa manusia ke dalam era persaingan global yang semakin ketat. Agar mampu berperan dalam persaingan global, maka perlu mengembangkan dan meningkatkan bakat siswa pada bidang studi Pendidikan Agama Islam. Peningkatan bakat siswa dalam bidang PAI merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif dan efisien dalam proses pembangunan. Kalau tidak ingin kalah bersaing dalam menjalani era globalisasi tersebut.

Berbicara mengenai peningkatan bakat bidang PAI pendidikan memegang, peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan bakat siswa bidang pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi

⁸ E. Mulyasa, *op.cit*, h. 57.

dengan proses peningkatan bakat siswa itu sendiri. Pendidikan Agama Islam adalah esensial bahkan merupakan salah satu elemen terpenting dari kehidupan seseorang. Harus diakui bahwa tingkat “pendidikan” dapat menjadi ukuran tingkat kemampuan berfikir seseorang. Pendidikan bukanlah hal mudah dan sederhana, karena selain sifatnya yang kompleks, dinamis dan kontekstual, Pendidikan Agama Islam merupakan wahana untuk pembentukan diri seseorang secara keseluruhan. Peranan dalam pembentukan diri sebagai peningkatan bakat siswa sebagai tujuan umum pendidikan yang meliputi aspek kognitif berupa keterampilan akademik dan keterampilan berfikir yang lebih tinggi (kemampuan memecahkan masalah).⁹

Pendidikan dalam prosesnya juga mencakup tujuan pengembangan aspek pribadi dan sosial yang memungkinkan orang bekerja dan hidup dalam kelompok secara kreatif, inisiatif, empati dan yang memiliki keterampilan interpersonal yang memadai sebagai bekal bermasyarakat. Sedangkan tugas Pendidikan Agama Islam adalah memberikan bekal kepada siswa agar potensinya berkembang wajar, optimal dan bersifat adaptif dalam menghadapi berbagai permasalahan kelak setelah menamatkan studinya. Sehingga sifat dasar manusia yang skeptis, eksploratif, dan juga kreatif, bisa berkembang dan menemukan artikulasinya dalam proses belajar mengajar sewaktu mengikuti suatu program pendidikan. Lulusan yang skeptis, inovatif, dedikatif, eksploratif, kreatif dan berkemampuan daya saing yang harus diupayakan serta menjadi bahan antisipasi sistem dan perencanaan pendidikan

⁹ Rumlina dan Jiyono, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep Kemungkinan Strategi Pelaksananya di Indonesia*, (Cet. VI; Jakarta: Gramedia, 2005), h. 77-78.

terutama di era otonomi daerah, yang diperkirakan kondisi ekonominya akan tumbuh dengan cepat.¹⁰

Persoalan-persoalan di atas, melatar belakangi keinginan peneliti untuk mencermati dan mengkaji secara lebih mendalam mengenai pandangan dan sikap serta proses penetapan kebijakan kurikulum, peran, fungsi dan evaluasi kinerja fungsi komite disekolah, serta keterlibatan atau partisipasi komite sekolah sebagai formal *stakeholders* penting dalam penetapan kebijakan satu-satunya organisasi kurikulum. ini masih perlu dikaji dan diteliti secara seksama, sehingga peran keduanya dapat berjalan sejajar dalam satu rel peningkatan kualitas, pendidikan Indonesia, dan khususnya bagi lembaga pendidikan itu sendiri, terutama pada SDN 207 Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh komite sekolah terhadap peningkatan bakat siswa pada bidang studi Pendidikan Agama Islam di SDN No. 207 Taripa Kecamatan Angkona?
2. Bagaimana proses penetapan kebijakan kurikulum di SDN No. 207 Taripa Kecamatan Angkona?
3. Bagaimana pengaruh komite sekolah dalam proses penetapan kebijakan di SDN No. 207 Taripa Kecamatan Angkona?

¹⁰ Salladien, *Ilmu Pengetahuan Sosial, Alternatif Model Pendidikan Berorientasi Dunia Kerja*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Ilmu, 2002), h. 10.

C. Tujuan Penelitian

Sudah merupakan suatu keharusan setiap aktivitas mempunyai tujuan yang hendak dicapai, demikian juga dengan kegiatan penelitian ini yang mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh komite sekolah terhadap peningkatan bakat siswa pada bidang studi Pendidikan Agama Islam di SDN No. 207 Taripa Kecamatan Angkona?
2. Untuk mengetahui proses penetapan kebijakan kurikulum di SDN No. 207 Taripa Kecamatan Angkona?
3. Untuk mengetahui pengaruh komite sekolah dalam proses penetapan kebijakan di SDN No. 207 Taripa Kecamatan Angkona?

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari segi teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Ilmiah
 - a. Mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan penulis melalui bahasa ilmiah.
 - b. Mengembangkan ilmu khususnya dalam bidang kelembagaan/organisasian lebih spesifik lagi pada penetapan-penetapan kebijakan.

2. Kegunaan Praktis

Informasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai studi evaluasi dan sebagai bahan pertimbangan serta sumber data bagi pihak sekolah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan di SDN No. 207 Taripa Kecamatan Angkona.



IAIN PALOPO

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

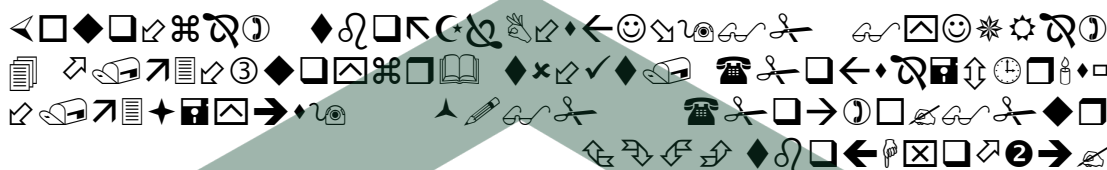
A. Pengertian Komite Sekolah

Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadai peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.¹

Komite Sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non-profit dan non-politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholder pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan. Penyederhanaan konsep masyarakat itu dilakukan melalui perwakilan fungsi stakeholder, dengan jalan membentuk Komite Sekolah pada setiap sekolah. Komite Sekolah sedapat mungkin bisa mempresentasikan keragaman yang ada agar benar-benar dapat mewakili masyarakat. Dengan demikian, interaksi antara sekolah dan masyarakat dapat diwujudkan melalui mekanisme pengambilan keputusan antara sekolah-sekolah dengan Komite Sekolah, sebagai lembaga pendidikan, sekolah berperan untuk dapat mengembangkan berbagai potensi peserta didik agar mampu melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawab baik sebagai makhluk individu maupun sebagai anggota masyarakat dan umat beragama serta pendukung

¹ Depdiknas, *Panduan Manajemen Sekolah*, (Jakarta: Depdikbud, 1999), h. 45.

kebudayaan bangsa. Hal ini memberikan suatu pemaknaan bahwa sekolah merupakan inti dan masyarakat merupakan plasma, mempersiapkan generasi muda untuk mengembangkan tugas sejarah dan budaya serta agama bangsanya. Hal ini dapat diisyaratkan dalam Q.S. al-Hujurat (49) : 10 :



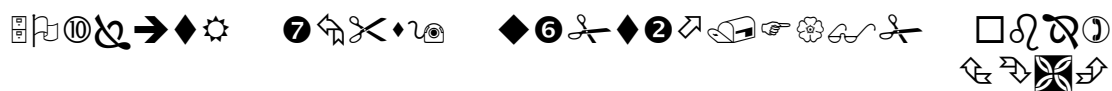
Terjemahnya:

Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.²

Desentralisasi pendidikan diingat sekolah merupakan satu bentuk desentralisasi yang langsung sampai ke ujung tombak pendidikan di lapangan. Jika kantor cabang dinas pendidikan kecamatan, dan dinas pendidikan kabupaten/kota lebih memiliki peran sebagai fasilitator dalam proses pembinaan, pengarahan, pemantauan dan penilaian, maka sekolah seharusnya diberikan peran nyata dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporean. Komite Sekolah menjadi pendamping bahkan penyeimbang bagi sekolah-sekolah, sehingga setiap rencana dan program yang disusun oleh sekolah dapat diberikan masukan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat yang diwakili oleh Komite Sekolah dimaksud. Atas nama masyarakat yang diwakilinya, Komite Sekolah dapat menyatakan setuju atau tidak setuju

² Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag. RI., 2000), h. 412.

terhadap rencana dan program pendidikan yang disusun oleh sekolah. Hal ini dapat diisyaratkan dalam QS. Al-Infithaar (82) : 31 :



Terjemahnya :

Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan.³

B. Pemberdayaan Komite Sekolah

Desentralisasi pendidikan di tingkat sekolah merupakan satu bentuk desentralisasi yang langsung sampai ke ujung tombak pendidikan di lapangan. Jika kantor cabang dinas pendidikan kecamatan, dan dinas pendidikan kabupaten/kota lebih memiliki peran sebagai fasilitator dalam proses pembinaan, pengarahan, pemantauan dan penilaian, maka sekolah seharusnya diberikan peran nyata dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Hal ini disebabkan karena proses interaksi edukatif di sekolah merupakan inti dari proses pendidikan yang sebenarnya. Oleh karena itu, bentuk desentralisasi pendidikan yang paling mendasar adalah yang dilaksanakan oleh sekolah, dengan menggunakan Komite Sekolah sebagai wadah pemberdayaan peran serta masyarakat, dan dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai proses pelaksanaan layanan pendidikan secara nyata di dalam masyarakat, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat perlu dibentuk Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten/kota, dan Komite Sekolah di

³ *Ibid.*, h. 469.

tingkat satuan pendidikan. Amanat rakyat ini sejalan dengan konsepsi desentralisasi pendidikan, baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat sekolah. Amanat rakyat dalam undang-undang tersebut telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.⁴ Dalam Kepmendiknas tersebut disebutkan bahwa peran yang harus diemban Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalah (1) sebagai advisory agency (pemberi pertimbangan), (2) supporting agency (pendukung kegiatan layanan pendidikan), (3) controlling agency (pengontrol kegiatan layanan pendidikan dan (4) mediator atau penghubung atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan dalam hal pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, yakni:

1. Penyusunan Rencana dan Program, sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan, sekolah bertanggungjawab dalam menentukan kebijakan sekolah dalam melaksanakan kebijakan pendidikan sesuai dengan arah kebijakan pendidikan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sebagai penyelenggara dan pelaksana kebijakan pendidikan nasional, sekolah-sekolah bertugas untuk menjabarkan kebijakan pendidikan nasional menjadi program-program operasional penyelenggaraan pendidikan di masing-masing sekolah. Untuk dapat memerankan fungsi ini, Komite Sekolah menjadi pendamping bahkan penyeimbang bagi sekolah-sekolah, sehingga setiap rencana dan program yang disusun oleh sekolah dapat diberikan masukan yang

⁴ Dirjen Disdasmen, *Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2002), h. 90.

sesuai dengan aspirasi masyarakat yang diwakili oleh Komite Sekolah dimaksud. Atas nama masyarakat yang diwakilinya, Komite Sekolah dapat menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap rencana dan program pendidikan yang disusun oleh sekolah. Dalam penyusunan program pendidikan *life skill* yang dapat dilaksanakan oleh sekolah.⁵ Mekanisme yang mungkin dapat dilakukan adalah melalui rapat Komite Sekolah dengan sekolah yang dilaksanakan setiap semester atau tahunan, untuk menyusun, memperbaiki serta menyesuaikan rencana dan program untuk semester berikutnya.

2. Penyusunan Rancangan Anggaran pendapat dan belanja sekolah (RAPBS) dalam fungsinya sebagai pelaksana pendidikan yang otonom, sekolah berperan dalam menyusun RAPBS setiap akhir tahun ajaran untuk digunakan dalam tahun ajaran kedepan perlu dituangkan kedalam kegiatan-kegiatan serta anggarannya masing-masing sesuai dengan pos-pos pengeluaran pendidikan di tingkat sekolah. Dari sisi pendapatan, seluruh jenis dan sumber pendapatan yang diperoleh sekolah setiap tahun harus dituangkan dalam RAPBS, baik yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kecamatan, maupun sumber-sumber lain yang diperoleh secara langsung oleh sekolah-sekolah. Dengan demikian, setiap rupiah yang diperoleh sekolah dari sumber-sumber tersebut harus sepenuhnya diperhitungkan sebagai pendapatan resmi sekolah dan diketahui bersama pihak sekolah (kepala sekolah, guru-guru, pegawai, serta para siswa) maupun oleh Komite

⁵ Notoatmodjo Soekidji, *Pengembangan Suberdaya Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 32.

Sekolah sebagai wakil stakeholder pendidikan, dari sisi belanja sekolah, seluruh jenis pengeluaran untuk kegiatan pendidikan di sekolah harus diketahui bersama baik oleh pihak sekolah maupun oleh pihak Komite Sekolah, sesuai dengan rencana dan program yang disusun bersama oleh kedua pihak tersebut. Kedua sisi anggaran tersebut dituangkan ke dalam suatu rencana tahunan sekolah yang disebut dengan RAPBS yang harus disahkan atas dasar persetujuan bersama antara pihak sekolah dan Komite Sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan ketua Komite Sekolah. Pelaksanaan program pendidikan sistem pendidikan pada masa orde baru, pelaksanaan pendidikan secara langsung dikendalikan oleh sistem birokrasi dengan mata rantai yang panjang sejak tingkat pusat, daerah bahkan sampai tingkat satuan pendidikan. Kepala sekolah tidak diberikan kesempatan untuk mengurus dan mengatur dirinya sendiri dan pelaksanaan pendidikan. Kepala sekolah tidak diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan mereka sendiri dalam mengelolah sistem pendidikan untuk memecahkan berbagai permasalahan pendidikan yang sesuai dengan kondisi sekolahnya masing-masing.⁶

3. Masa desentrasi pendidikan ke depan, melalui paradigma MBS sekolah-sekolah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengurus dan mengatur pelaksanaan pendidikan pada masing-masing sekolah. Pelaksanaan pendidikan di sekolah-sekolah dalam tempat yang berlainan dimungkinkan untuk menggunakan sistem dan pendekatan pembelajaran yang berlainan. Kepala sekolah diberikan

⁶ Dirjen Disdasmen, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (Konsep Dasar Rencana dan Program Pelaksanaan, Panduan Monitoring dan Evaluasi, Pedoman Tata Krama dan Tata Tertib Pembelajaran dan Pengajaran Kontekstual)*, (Jakarta: Depdiknas, 2002), h. 65.

keleluasaan untuk mengelola pendidikan dengan jalan mengadakan serta memanfaatkan sumber daya pendidikan sesuai dengan kebijakan dan standar yang ditetapkan oleh pusat.⁷ Keadaan seperti itu, maka dewan pendidikan dan Komite Sekolah akan dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai penunjang dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang sejalan dengan kondisi dan permasalahan lingkungan masing-masing sekolah. Komite Sekolah dapat melaksanakan fungsinya sebagai partner dari kepala sekolah dalam mengadakan sumber-sumber daya pendidikan dalam rangka melaksanakan pengelolaan pendidikan yang dapat memberikan fasilitas bagi guru-guru dan murid untuk belajar sebanyak mungkin, sehingga pembelajaran menjadi semakin efektif. Komite Sekolah bisa ikut serta untuk meneliti dari berbagai permasalahan belajar yang dihadapi oleh murid secara kelompok maupun secara individual sehingga dapat membantu guru-guru untuk menerapkan pendekatan belajar yang tepat bagi murid-muridnya. Dewan pendidikan yang diterapkan terutama menyangkut berbagai dampak yang sudah atau mungkin terjadi dalam penerapan suatu kebijakan baru.

4. Akuntabilitas pendidikan, dalam masa orde baru, satu-satunya pihak yang berwenang untuk meminta pertanggungjawaban pendidikan di sekolah-sekolah adalah pemerintah pusat. Pada waktu itu, pemerintah pusat telah menetapkan kaki tangannya di seluruh plosok tanah air melalui pemeriksa, pengawas atau para penilik sekolah untuk mengawasi dan meminta pertanggungjawaban sekolah-sekolah proses

⁷ Enoch, *Dasar-dasar Perencanaan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara; Fowler G., et.all, 1998), h. 63.

pendidikan yang berlangsung di sekolah-sekolah.⁸ Jika terdapat penyimpangan administratif yang dilakukan oleh kepala sekolah atau guru-guru, maka kepada mereka diberikan sanksi administratif, seperti teguran resmi, penilaian melalui DP3, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat dan sejenisnya. Namun, penilaian tersebut lebih banyak diberikan terhadap proses administrasi pendidikan dan hampir tidak pernah ada sanksi (punishment) atau ajaran (rewards) kepada guru-guru atau kepala sekolah atas dasar hasil-hasil yang dicapai dalam pembelajaran atau lulusan.

Dalam era demokrasi atau partisipasi, akuntabilitas pendidikan tidak hanya terletak pada pemerintah, tetapi bahkan harus lebih banyak pada masyarakat sebagai stakeholder pendidikan. Sama halnya, Komite Sekolah dapat menyampaikan ketidakpuasan para orang tua murid akan rendahnya prestasi yang dicapai oleh suatu sekolah. Dewan pendidikan atau Komite Sekolah tidak perlu melaksanakan kegiatan studi atau penilaian pendidikan, tetapi cukup dengan menggunakan data-data yang tersedia atau hasil-hasil penilaian yang sudah ada sebagai bahan untuk menyampaikan kepuasan atau ketidakpuasan masyarakat terhadap dinas pendidikan atau kepada masing-masing sekolah.

IAIN PALOPO

C. Bakat Siswa dalam Proses Pembelajaran

⁸ Notoatmodjo Soekidji, *op.cit.*, h. 28.

Untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal, banyak dipengaruhi komponen-komponen belajar mengajar sebagai contoh bagaimana cara mengorganisasikan materi, metode yang diterapkan, media yang digunakan dan lain-lain. Tetapi di samping komponen-komponen pokok yang ada dalam kegiatan belajar mengajar, ada faktor lain yang ikut mempengaruhi keberhasilan belajar siswa, yaitu soal hubungan antara guru dan siswa.

Hubungan guru dan siswa atau anak didik di dalam proses belajar mengajar merupakan faktor yang sangat menentukan. Bagaimanapun baiknya bahan pelajaran yang diberikan, bagaimanapun sempurnanya metode yang digunakan, namun jika hubungan guru dan siswa merupakan hubungan yang tidak harmonis maka akan tercipta suatu hasil yang tidak diinginkan. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka diperlukan sebuah pendekatan *face to face* (langsung) antar guru dan siswa dengan menggunakan jam-jam di luar jam pertemuan dalam kelas.⁹

Perlu digaris bawahi bahwa kegiatan belajar mengajar tidak hanya melalui presentasi atau sistem kuliah di depan kelas bahkan sementara dikatakan bahwa metode dengan kuliah (presentasi) tidaklah dianggap sebagai satu-satunya proses belajar yang efisien bila ditinjau baik dari segi pengembangan sikap dan ikiran intelektual yang kritis dan kreatif. Dengan demikian, bentuk kegiatan belajar selain pengajaran di depan kelas, perlu diperhatikan bentuk-bentuk kegiatan belajar mengajar yang lain.

⁹ Enoch, *op.cit.*, h. 66.

Dalam saat-saat semacam itu dapat dikembangkan komunikasi dua arah, guru dapat menanyai dan mengungkap keadaan siswa dan sebaiknya siswa mengajukan berbagai persoalan-persoalan dan hambatan yang sedang dihadapi sehingga terjadilah suatu proses interaksi dan komunikasi yang humanistik.

Hal ini jelas akan sangat membutuhkan keberhasilan studi para siswa, berhasil dalam arti tidak sekedar tahu atau mendapatkan nilai baik dalam ujian, tetapi akan menyentuh pada soal sikap mental dan tingkah laku atau hal-hal yang *intrinsic*. Dengan demikian, tujuan kemanusiaan harus selalu diperhatikan sehingga salah satu hasil pendidikan yang diharapkan yakni manusia yang memiliki kesadaran untuk memperlakukan orang lain dengan penuh respon.

Namun, harus diakui bahwa informal semacam itu belum banyak dikembangkan. Di samping itu, perlu juga diingat adanya hambatan-hambatan tertentu, misalnya masih adanya sikap otoriter dari guru, siswa yang pasif, jumlah siswa yang terlalu besar, sistem pendidikan, keadaan dan latar belakang guru sendiri maupun para siswanya. Untuk mengatasi itu, semua perlu dikembangkan sikap demokratis dan terbuka dari para guru, perlu ada keaktifan dari pihak siswa dan guru harus bersikap ramah. Sebaliknya, siswa juga harus bersikap sopan, saling hormat-menghormati, guru harus lebih bersifat manusiawi, rasio guru dan siswa yang lebih proporsional, masing-masing pihak bila perlu mengetahui latar belakang baik guru maupun siswa. Apabila hal-hal tersebut dapat terpenuhi maka akan terciptalah suatu komunikasi yang selaras antar guru dan siswa dalam proses belajar mengajar.

Bakat menciptakan kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Kemampuan tersebut akan berkembang dengan baik apabila mendapat respon yang positif dalam lingkungannya. Dan sebaiknya, bakat tidak dapat berkembang dengan baik jika lingkungan tidak dapat memberinya kesempatan untuk berkembang dan tidak ada interaksi yang baik dan mendukung. Dalam hal ini faktor pendidikan mempunyai arti yang sangat penting dan menentukan perkembangan bakat seseorang.

Tampak lebih mengikuti definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli, seperti di dalam definisi bakat yang dikemukakan Moke FJ. bahwa bakat mencakup tiga dimensi yaitu (i) dimensi perseptual, (ii) dimensi psikomotor, dan (iii) dimensi intelektual. Ketiga dimensi itu menggambarkan bahwa bakat tersebut mencakup kemampuan dalam pengindraan, ketepatan dan kecepatan menangkap makna, ketepatan dan berpikir inteligen. Atas dasar bakat yang dimiliki maka setiap individu akan mampu menunjukkan kelebihan dalam bertindak dan menguasai serta memecahkan masalah.¹⁰

Seseorang yang memiliki bakat akan cepat diamati, sebab kemampuan yang dimiliki akan berkembang dengan cepat dan menonjol. Bakat khusus merupakan salah satu kemampuan di dalam bidang tertentu seperti pada bidang seni, olah raga, dan keterampilan. Bakat memungkinkan seseorang untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu. Namun diperlukan latihan, pengetahuan, pengalaman, dan motivasi agar bakat tersebut dapat terwujud. Misalnya seseorang mempunyai bakat

¹⁰ Moke FJ. dkk., *Psikologi Perkembangan*, (Cet. IV; Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1984), h. 168-169.

menggambar, jika ia tidak pernah diberi kesempatan untuk mengembangkan bakatnya, maka bakat tersebut tidak akan nampak. Dan apabila orang tua menyadari bahwa anaknya mempunyai bakat menggambar dan mengusahakan agar ia mendapat pengalaman yang sebaik-baiknya dan anak tersebut juga menunjukkan minat dan perhatian yang besar untuk mengikuti pendidikan menggambar, maka ia akan mencapai prestasi yang baik bahkan dapat menjadi pelukis yang terkenal. Sebaliknya, seorang anak yang mendapat pendidikan menggambar dengan baik namun tidak memiliki bakat menggambar, maka tidak akan pernah mencapai prestasi yang baik untuk bidang tersebut.

Dalam lingkungan sekolah sering kita temukan bahwa seseorang yang mempunyai bakat dalam bidang olahraga, umumnya prestasi mata pelajaran bidang lainnya juga baik. Tapi sebaliknya dapat terjadi prestasi semua bidang pelajarannya akan mendapatkan hasil yang tidak baik. Agar bakat berkembang dengan baik maka perlu dilakukan cara-cara sebagai berikut :

1. Selalu berusaha untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik pada diri anak.
2. Percobaan pendidikan bakat anak di bidang ruang.
3. Perlu adanya rasa gembira dalam mengembangkan bakat anak.
4. Mengembangkan bakat anak harus dengan hati-hati.
5. Senantiasa memahami perasaan anak.¹¹

¹¹ Sardiman A., *Belajar Mengajar*, (Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1986), h. 77.

Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang tidak dapat mewujudkan bakat dan prestasinya secara optimal, terletak pada :

- a. Anak itu sendiri, misalnya anak tersebut tidak atau kurang berminat untuk bakat-bakat yang ia miliki, atau kurang termotivasi untuk mencapai prestasi yang tinggi, atau mungkin pula mempunyai kesulitan atau masalah pribadi sehingga ia mengalami hambatan dalam pengembangan diri dan berprestasi sesuai dengan bakatnya.
- b. Lingkungan anak, misalnya orang tua yang kurang mampu untuk menyediakan kesempatan dan sarana pendidikan yang ia butuhkan atau ekonominya cukup tinggi tetapi kurang memberi perhatian terhadap pendidikan anak.¹²

Manusia adalah makhluk sosial, ia senantiasa memerlukan bantuan orang lain. Dalam masalah pendidikan, bantuan ini disebut bimbingan atau *guidance* yang berarti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Sesuai dengan istilahnya, maka secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan.

Bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial.¹³ Selain itu, masih ditambahkan bahwa juga dapat diberikan suatu pengertian tentang bimbingan: *Guidance is continous process of helping the individual develop to the maximum of his capacity in the*

¹² *Ibid.*, h. 172.

¹³ Hallen A., *Bimbingan dan Konseling*, (Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 4.

*direction most beneficial to himself and to society.*¹⁴ Bimbingan adalah proses yang terus menerus dalam membantu perkembangan individu untuk mencapai kemampuannya secara maksimum dalam mengarahkan manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat.

Masalah belajar merupakan inti dari kegiatan di sekolah, karena semua usaha di sekolah diperuntukkan bagi berhasilnya proses belajar bagi setiap siswa yang sedang belajar di sekolah tersebut. Oleh karena itu, pemberian pelayanan bimbingan berarti memberikan pelayanan belajar bagi setiap siswa. Pemberian bimbingan di sekolah bertujuan agar peserta didik dapat memahami diri sendiri, sehingga mampu mengarahkan diri dan bertingkah laku yang wajar sesuai dengan tuntutan serta keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Tujuan bimbingan belajar secara umum adalah membantu siswa agar peserta didik mendapat penyesuaian yang baik didalam situasi belajar, sehingga mereka dapat belajar dengan efisien sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dan mencapai perkembangan yang optimal.

D. Peranan Siswa dalam Proses Belajar Mengajar

Anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Anak didik bukan binatang, tetapi ia adalah manusia yang mempunyai akal. Anak didik adalah unsur manusiawi yang penting dalam kegiatan interaksi edukatif. Ia dijadikan sebagai pokok persoalan dalam semua gerak kegiatan pendidikan dan pengajaran. Sebagai

¹⁴ *Ibid.*, h. 6.

pokok persoalan, anak didik memiliki peranan yang menempati posisi yang menentukan dalam sebuah interaksi. Guru tidak mempunyai arti apa-apa tanpa kehadiran anak didik sebagai subjek pembinaan. Jadi, anak didik adalah kunci yang menentukan untuk terjadinya interaksi edukatif. Setiap anak didik memiliki gaya yang berbeda dalam belajar. Perbedaan yang dimiliki anak didik tersebut Bobi Deporter menamakannya sebagai unsur modalitas belajar. Menurutnya ada tiga tipe gaya belajar anak didik, yaitu pertama tipe visual adalah gaya belajar dengan cara melihat, artinya anak didik akan lebih cepat belajar dengan cara menggunakan indra penglihatannya, kedua tipe auditorial adalah tipe belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh.¹⁵

Pendidikan merupakan suatu keharusan yang diberikan kepada anak didik. Anak didik sebagai manusia yang berpotensi perlu dibina dan dibimbing dengan perantaraan guru. Potensi anak didik yang bersifat laten perlu diaktualisasikan agar anak didik tidak lagi dikatakan sebagai *animal educable* sejenis binatang yang memungkinkan untuk dididik, tetapi ia harus dianggap sebagai manusia secara mutlak. Sebagai manusia yang berpotensi, maka di dalam diri anak didik ada suatu daya yang dapat tumbuh dan berkembang di sepanjang usianya. Potensi anak didik sebagai manusia secara mutlak. Sebagai manusia yang berpotensi, maka di dalam diri anak didik ada suatu daya yang tersedia, sedang pendidikan sebagai alat yang ampuh untuk mengembangkan daya itu. Bila anak didik sebagai komponen inti dalam

¹⁵ Wina Sanjaya, *Pembelajaran dalam Implementasi*, (Cet. V; Jakarta, Pustaka Pelajar, 2009), h. 16-17.

kegiatan pendidikan, maka anak didiklah sebagai pokok persoalan dalam interaksi edukatif.

Sebagai makhluk manusia, anak didik memiliki karakteristik. Menurut Dewa Ketut Sukardi karakteristik anak didik yaitu:

1. Belum memiliki pribadi dewasa sehingga masih dalam tanggung jawab pendidik.
2. Masih menyempurnakan aspek tertentu dari kedewasaannya sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik.
3. Memiliki sifat-sifat dasar manusia yang sedang berkembang secara terpadu yaitu kebutuhan biologis, rohani, sosial, inteligensi, emosi, kemampuan berbicara, latar belakang sosial serta perbedaan individual.¹⁶

Guru perlu memahami karakteristik anak didik sehingga mudah melaksanakan interaksi edukatif. Kegagalan menciptakan interaksi edukatif yang kondusif, berpangkal dari kedangkalan pemahaman guru terhadap karakteristik anak didik sebagai individu. Bahan, metode, sarana/alat, dan evaluasi, tidak dapat berperan lebih banyak, bila guru mengabaikan aspek anak didik. Sebaiknya sebelum guru mempersiapkan tahapan-tahapan interaksi edukatif, guru memahami keadaan anak didik. Ini penting agar dapat mempersiapkan segala sesuatunya secara akurat, sehingga tercipta interaksi edukatif yang kondusif, efektif, dan efisien.

Pendidikan yang ekstensif dalam teori sistematis dan bidang ilmunya memberi seorang profesional jenis pengetahuan yang tidak dimiliki oleh bukan ahli dalam bidang ilmu itu. Kenyataan ini menjadi dasar bagi kewenangan seorang profesional.

¹⁶ Dewa Ketut Sukardi, *Bimbingan dan Penyuluhan Belajar di Sekolah*, (Cet. IV; Surabaya: Usaha Nasional, 1983), h. 80.

Unsur kewenangan ini ialah alasan mengapa orang-orang profesional menuntut otonomi dan tanggung jawab dalam pekerjaan mereka. Akan tetapi kewenangan ini tidak tanpa batas, fungsinya terbatas hanya pada bidang-bidang khusus dalam mana seorang profesional telah dididik dan dilatih. Jadi seorang profesional tidak dapat menetapkan petunjuk-petunjuk mengenai segi-segi kehidupan klien dimana kemampuan teoritisnya tidak berlaku. Berani memberikan petunjuk serupa itu ialah memasuki suatu wilayah dimana ia sendiri adalah seorang awam, dan karenanya melanggar kewenangan ke kelompok profesi lain.

Untuk memelihara profesionalisme agar berkembang dinamis konsisten diperlukan suatu kode etik, yang mengikat jabatan fungsional guru. Setiap negara mempunyai kode etik guru, misalnya di Amerika Serikat ada kode etik yang dirumuskan oleh NEA (*National Education Association*). Gunanya ialah untuk dijadikan pedoman dalam melakukan tugas profesi. Kode etik itu tidak akan bermanfaat bila tidak diakui oleh pemegang profesi dan juga oleh masyarakat. Adapun kode etik yang dimaksud ialah : (1) berbakti membimbing peserta didik, (2) melaksanakan kejujuran profesional, (3) berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik, (4) menciptakan suasana sekolah, (5) memelihara hubungan baik dengan orang tua/masyarakat, (6) meningkatkan mutu dan martabat profesi, (7) memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial, (8) meningkatkan mutu organisasi sebagai sarana perjuangan dan pengabdian serta (9) melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Kewenangan pribadi orang-orang profesional dalam berhadapan dengan klien didasarkan atas kemampuan yang tinggi dari mereka, tidak karena memegang jabatan. Kenyataan bahwa mereka telah memperoleh keterampilan-keterampilan yang lengkap dan sudah memiliki norma-norma dan standar-standar membuat hadirnya orang-orang yang mengkhususkan dalam pengawasan tidak perlu.

Dengan demikian keberadaan Dewan Pendidikan atau Komite Sekolah tidak perlu melaksanakan kegiatan studi atau penilaian pendidikan, tetapi cukup dengan menggunakan data-data yang tersedia atau hasil-hasil penilaian yang sudah ada sebagai bahan untuk menyampaikan kepuasan atau ketidakpuasan masyarakat terhadap Dinas Pendidikan atau kepada masing-masing sekolah. Berdasarkan kenyataan di atas, dapat dilihat bahwa Komite Sekolah sangat memegang peranan penting bagi penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan adanya pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, pendukung baik finansial, pemikiran, tenaga, pengontrol, mediator di satuan pendidikan.

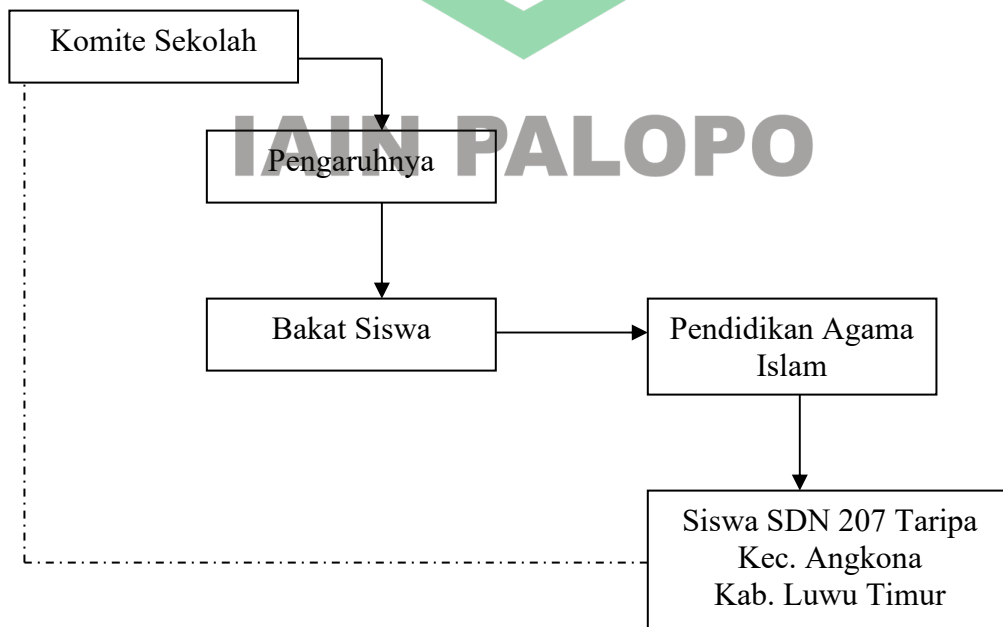
E. Kerangka Pikir **IAIN PALOPO**

Desentralisasi pendidikan di tingkat sekolah merupakan sesuatu bentuk desentralisasi yang langsung ke ujung tombak pendidikan di lapangan. Oleh karena itu, bentuk desentralisasi pendidikan yang paling mendasar adalah yang dilaksanakan di sekolah, dengan menggunakan Komite Sekolah sebagai wadah pemberdayaan

peran serta masyarakat, dan dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah sebagai proses pelaksanaan layanan pendidikan secara nyata di dalam masyarakat.

Komite Sekolah menjadi pendamping bahkan penyeimbang bagi sekolah-sekolah, sehingga setiap rencana dan program yang disusun oleh sekolah dapat diberikan masukan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat yang diwakili oleh Komite Sekolah dimaksud. Komite Sekolah dapat menyatakan setuju atau tidak terhadap rencana dan program pendidikan yang disusun oleh sekolah.

Untuk dapat meningkatkan bakat siswa pada bidang studi Pendidikan Agama Islam dan menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik. Itulah sebabnya maka melalui Komite Sekolah diharapkan dapat meningkatkan bakat siswa pada bidang studi Pendidikan Agama Islam dan mengembangkan sekolah, serata meningkatkan keterlibatan aktif dari para elemen sekolah di dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pendidikan itu sendiri, hal ini dapat digambarkan pada kerangka pikir di bawah ini:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain dan Varibel Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pengaruh komite sekolah terhadap peningkatan bakat siswa pada bidang studi pendidikan agama Islam di SDN No. 207 Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur, dimana penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret s/d bulan April 2011.

Dengan demikian penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang dimaksud dengan desain kuantitatif ialah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai atas menemukan keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.

Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹

Penelitian ini menggunakan 2 jenis variabel, yaitu variabel terikat dan variabel bebas, variabel terikatnya adalah peran komite sekolah sebagai Badan Pertimbangan dalam meningkatkan bakat siswa pada bidang studi PAI di SDN 207 Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur sedangkan variabel bebasnya adalah bakat siswa pada bidang studi Pendidikan Agama Islam dan ini merupakan

¹ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Cet. II; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h. 105-106.

implikasi dari peran komite sekolah yang selanjutnya dikaji dalam penelitian tentang pengaruhnya terhadap bakat siswa pada bidang studi Pendidikan Agama Islam.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah semua anggota sekelompok orang atau objek yang telah dirumuskan secara jelas. Hal ini diperjelas oleh Arikunto bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian.² Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pengurus Komite Sekolah SDN 207 Taripa Kecamatan Angkona yang berjumlah 17 orang, guru 16 orang dan 181 siswa SDN 207 Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur. Dengan demikian jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 214 orang.

2. Sampel

Sampel untuk pengambilan keputusan besarnya sampel maka berpedoman pada pendapat yang dikemukakan oleh Arikunto bahwa untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitian merupakan penelitian populasi.³ Jadi sampel dalam penelitian ini

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 108.

³ *Ibid.*, h. 109.

ditentukan berdasarkan rumus : di atas 100 = 10 – 15% atau 15-25% sehingga jumlah sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini sebesar 25% yakni sebanyak 55 orang.

C. Instrumen Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang sah dalam pengumpulan data, sangat perlu penyusunan instrumen yang tepat, yakni mengacu pada variabel yang menjadi fokus penelitian. Pembuatan dan pengembangan instrumen dilakukan setelah jabaran masing-masing variabel penelitian ditetapkan.⁴ Hal ini dimaksudkan untuk membantu atau mempermudah peneliti di dalam pengumpulan data menurut kebutuhan peneliti terutama alat ukur yang digunakan dalam mengetahui peran Komite Sekolah di SDN 207 Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur. Instrument dalam penelitian ini antara lain teks wawancara atau pedoman wawancara dan anngket pertanyaan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini dalam upaya memperoleh data, baik data primer maupun sekunder digunakan metode-metode yang terdiri dari:

1. Wawancara, yaitu suatu instrumen penelitian melalui pendekatan individu, berupa tanya jawab langsung terhadap beberapa informan yang dianggap dapat

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya 2002), h. 31.

memberikan jawaban yang akurat serta sistematis, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁵

2. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan di lapangan dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Dalam hal ini penulis tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independent. Observasi dilakukan untuk melihat hasil kerja Komite Sekolah di SDN 207 Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur, menyangkut peningkatan bakat siswa pada bidang studi Pendidikan Agama Islam di SDN 207 Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur.

3. Dokumentasi, yaitu teknik yang digunakan untuk mendapatkan data yang tidak diperoleh melalui angket. Metode ini merupakan pengumpulan data melalui catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, keterangan tertulis, dan sebagainya yang berisi data atau informasi yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, yakni untuk memperoleh data tentang pelaksanaan peran Komite Sekolah dengan mengambil dokumentasi keterlibatan Komite Sekolah di SDN 207 Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur.

4. Angket, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.⁶

⁵ Arief Furchan, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), h. 25.

⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. IV; Bandung: CV. Alfabeta, 2008), h. 1999.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya guna memaparkan peran Komite Sekolah di SDN 207 Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur. Dalam peningkatan mutu pendidikan digunakan pendekatan kualitatif, di mana analisis permasalahannya dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif yang diawali dengan verifikasi data. Penelitian ini lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan terhadap dinamika antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika dan cara-cara berfikir formal dan argumentatif.⁷

Jadi dengan menggambarkan peningkatan bakat siswa pada mata pelajaran PAI digunakan pendekatan kualitatif dalam menarik kesimpulan. Dengan rumus presentase sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

F : Frekuensi yang sedang dicari persentasinya.

N : Jumlah frekuensi banyaknya individu

P : Angka presentasi.⁸

Data yang diteliti cenderung bersifat kuantitatif, penulis berusaha untuk mengkuantitatifkan yang disajikan dalam bentuk persentase.

⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1984), h. 109.

⁸ Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Cet. III; Jakarta: Rajawali Press, 1997), h. 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Sejarah singkat SDN No. 207 Taripa

Lembaga pendidikan (sekolah) adalah bagian penting dari usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dalam menatap masa depan. Begitu pentingnya sehingga hal tersebut, selalu menjadi pusat perhatian. Hal ini dapat diamati intensitasnya masyarakat terhadap perhatiannya bagi pengadaan dan pengembangan sekolah di suatu tempat.

Sekolah Dasar Negeri Nomor No. 207 Taripa adalah dimaksudkan untuk memberi gambaran kepada para pembaca tentang keadaan pada masa lampau yang dapat dijadikan bahan dalam menghadapi masa-masa yang akan datang dalam membina pendidikan pada SD Negeri pada khususnya dan pendidikan nasional pada umumnya. SDN No. 207 Taripa yang berdiri sejak 18 tahun yang silam, yang terletak jalan Pendidikan di desa Taripa kec. Angkona kabupaten Luwu Timur. Sekolah Dasar Negeri No. 207 Taripa didirikan pada tahun 1992 atas permintaan masyarakat di lingkungan tersebut, dengan pertimbangan jarak sekolah yang tersedia cukup jauh, kemudian anak usia sekolah yang ada cukup mendukung. Pada waktu awal berdirinya tidak disebut SDN No. 207 Taripa.¹

¹ Sumardi, Kepala SDN No. 207 Taripa, “Wawancara”, di Desa Taripa, Kec. Angkona, tgl. 05 April 2011.

Semenjak berdirinya sekolah tersebut sampai sekarang pihak pengelola telah banyak melakukan usaha kearah penyempurnaan dan pengembangan, sehingga dalam segala isi terlihat beberapa kemajuan dan pembaharuan, baik dalam proses belajar mengajar, peningkatan pengetahuan dan keterampilan guru dan pegawai maupun kurikulum. Semenjak pertama kali dibukanya sampai dengan saat sekarang ini, SDN No. 207 Taripa senantiasa selalu mengedepankan mutu pendidikan serta kualitas siswa yang nantinya ditelorkan dari sekolah tersebut, sesuai dengan visi dan misi dari SDN No. 207 Taripa itu sendiri.

Menurut Siti Rohyah, S.Pd., dalam wawancara terbuka dengan penulis, mengemukakan bahwa dalam proses belajar mengajar para guru selalu dituntut untuk mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya secara terus menerus, sehingga pengetahuannya berkembang pesat, pada sisi lain guru juga selalu dituntut untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai kepada peserta didik. Hal tersebut diupayakan dengan memberi peluang kepada guru untuk mengikuti pelajaran, lokakarya, seminar, simposium, workshop dan lain sebagainya sebagai upaya peningkatan kemampuan diri. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai upaya dan hasil yang optimal dalam mengelola proses belajar mengajar.²

Semenjak berdirinya sekolah tersebut sampai sekarang sudah mengalami 4 kali pergantian, yakni :

- a. Pada tahun 1992 s.d. tahun 1997 dibawa pimpinan H. Aisyah Ukkas.

² Siti Rohyah, Guru Kelas SDN No. 207 Taripa, "Wawancara", di Desa Taripa, Kec. Angkona, tgl. 05 April 2011.

- b. Pada tahun 1997 s.d. tahun 2002 dibawa pimpinan Abu.
- c. Pada tahun 2002 s.d. tahun 2007 dibawa pimpinan Abd. Kadir.
- d. Dan pada tahun 2007 s.d. sekarang dibawa kepemimpinan Sumardi, S.Pd.

Semenjak pertama kali dibukanya sampai dengan saat sekarang ini, SDN No. 207 Taripa senantiasa selalu mengedepankan mutu pendidikan serta kualitas siswa yang nantinya ditelorkan dari sekolah tersebut, sesuai dengan visi dan misi dari SDN No. 207 Taripa itu sendiri. Selanjutnya dalam wawancara singkat dengan penulis, Marhan, S.Pd. mengemukakan bahwa visi dan misi SDN No. 207 Taripa adalah :

“Visi: adalah menciptakan siswa yang berprestasi, beriman dan berbudi pekerti luhur serta lingkungan sekolah yang indah, bersih, aman dan menyenangkan.

Misi:

1. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap siswa dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
2. Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama, budi pekerti dan adat istiadat sebagai sumber budaya bangsa yang menjadi landasan dalam setiap bertindak.
3. Menerapkan manajemen partisipatif yang melibatkan seluruh warga sekolah dan kelompok yang terkait dengan kepentingan sekolah.
4. Memanfaatkan semua sumber dana untuk digunakan menata lingkungan sekolah sebagai sarana wisata pendidikan.
5. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan proses belajar-mengajar.³

Itulah sekilas tentang sejarah berdirinya SDN No. 207 Taripa, yang penulis ketengahkan tersebut, agar dapat dijadikan sebagai salah satu bahan di dalam usaha untuk lebih mengetahui dengan jelas tentang SDN No. 207 Taripa.

³ Sumardi, Kepala SDN No. 207 Taripa, “Wawancara”, di Desa Taripa, Kec. Angkona, tgl. 05 April 2011.

2. Keadaan Guru

Guru yang lazimnya dikenal sebagai pahlawan tanda jasa, pada suatu lembaga pendidikan mengemban suatu tugas yakni pendidik. Guru sebagai pendidik harus memberikan pengetahuan melalui proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran ini peserta didik akan mengalami perubahan menuju ke tingkat kedewasaan serta taraf pendidikan yang lebih efektif. Menjadi guru berdasarkan tuntutan pekerjaan adalah suatu perbuatan yang mudah, tetapi menjadi guru berdasarkan panggilan jiwa atau tuntutan hati nurani adalah tidak mudah, kepadanya lebih banyak dituntut suatu pengabdian kepada anak didik daripada karena tuntutan pekerjaan dan material oriented. Guru yang mendasarkan kepribadian karena panggilan jiwa merasakan jiwanya lebih dekat dengan anak didiknya.

Oleh karena itu, maka guru sebenarnya adalah tokoh ideal, pembawa norma dan nilai-nilai kehidupan masyarakat dan sekaligus pembawa cahaya terang bagi anak didik dalam kehidupan ilmu pengetahuan. Dengan demikian tugas guru adalah tugas yang sangat kompleks bahkan dapat dikatakan bahwa keberhasilan atau bermutu tidaknya suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh guru.

Dalam hal ini untuk mengetahui keadaan guru di SDN No. 207 Taripa, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1

Keadaan Guru dan Pegawai SDN No. 207 Taripa
Tahun Ajaran 2010/2011

No	Nama Guru/Pegawai	JK	Jabatan / Mata Pelajaran yg Diajarkan	Ket.
1.	Sumardi, S.Pd.	L	Kepala Sekolah	PNS
2.	I Wayan Kapal	L	Guru Kelas VI	PNS
3.	Ni Wayan Gawi, S.Ag.	P	Guru Kelas I - VI	PNS
4.	Siti Rohyah, S.Pd.	P	Guru Kelas III	PNS
5.	Rima, S.Pd.	P	Guru Kelas II A	PNS
6.	Ismanuryanti, S.Pd.	P	Guru Kelas V	PNS
7.	Syabli, A.Ma.	L	Guru Kelas IV - VI	PNS
8.	Joharno KR., S.Pd.	L	Guru Kelas IV - VI	PNS
9.	Kartini, A.Ma.	P	Guru PAI	PNS
10.	Zuhrul Ain, A.Ma.	P	Guru Kelas I A	PNS
11.	Nurhayati, A.Ma.	P	Guru Kelas IV	PNS
12.	I Made Wika	L	Guru Penj. Sek.	PNS
13.	Siti Komariah, A.Ma.	P	Guru Kelas I B	Non PNS
14.	Adriana	P	Guru Kelas PAK	Non PNS
15.	I Gede Puja Astawa	L	Guru Mulok	Non PNS
16.	Suwiyana	L	Guru Penjas	Non PNS
Jumlah				16

Sumber data: Papan nama guru dan pegawai SDN No. 207 Taripa Tahun Pelajaran 2010/2011.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, telah dapat diketahui bahwa SDN No. 207 Taripa dibawa pimpinan oleh 1 orang kepala sekolah dan tenaga guru sebanyak 15 orang.

3. Keadaan Pengurus Komite Sekolah

Dalam pembahasan tentang pengaruh komite sekolah terhadap peningkatan bakat siswa pada bidang studi PAI ini, juga akan diuraikan pengurus komite yang ada, yakni sebagai berikut :

Tabel 4.2

Kondisi Pengurus Komite Sekolah SDN No. 207 Taripa
Tahun 2010/2011

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Amiruddin	Ketua Komite	
2.	Jamaluddin	Sekretaris	
3.	Ernawati	Bendahara	
4.	Suparman	Anggota	
5.	Ahmad Nawawi	Anggota	
6.	Abdul Rasyid	Anggota	
7.	Muharram	Anggota	
8.	Syam Abdullah	Anggota	
9.	Sinar	Anggota	
10.	Mahmud	Anggota	
11.	Rifai Mukhtar	Anggota	
12.	Anwar S.	Anggota	
13.	Syafaruddin	Anggota	
14.	Nurdin	Anggota	
15.	Muh. Ridwan	Anggota	
16.	Iskandar	Anggota	
17.	Hamid	Anggota	
	Jumlah	17	

Sumber data : Kantor SDN No. 207 Taripa Tahun 2010/2011.

Dengan melihat kondisi secara keseluruhan pengurus komite sekolah, dari sekian banyak para pengurus yang akan membantu dalam proses pembelajaran terhadap siswa, yang secara tidak langsung turut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan bakat siswa pada bidang studi PAI di SDN No. 207 Taripa.

4. Keadaan Siswa

Sedangkan keadaan siswa SDN No. 207 Taripa tahun pelajaran 2010/2011 dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3

Keadaan Keseluruhan Siswa SDN No. 207 Taripa
Tahun Pelajaran 2010/2011

No	Kelas	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kelas I	20	18	38
2.	Kelas II	17	22	39
3.	Kelas III	16	15	31
4.	Kelas IV	14	15	29
5.	Kelas V	12	10	22
6.	Kelas VI	13	9	22
Jumlah		92	89	181

Sumber data : Kantor SDN No. 207 Taripa (Papan potensi siswa tahun pelajaran 2010/2011).

Berdasarkan tabel di atas, keseluruhan siswa yang ada saat ini di SDN No. 207 Taripa, maka dapat diperkirakan bahwa begitu banyaknya karakter siswa yang mempunyai ciri dan watak individu berbeda satu sama lain, maka tentunya akan membutuhkan kreativitas seorang pendidik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai seorang pengajar untuk membentuk karakter yang berbeda tersebut sesuai dengan visi dan misi dari SDN No. 207 Taripa itu sendiri.

4. Sarana dan Prasarana

Sarana pendidikan merupakan salah satu aspek yang dapat memperlancar proses pembelajaran, fasilitas pembelajaran yang tersedia dapat menunjang pencapaian tujuan pengajaran secara efisien dan efektif. Apalagi dewasa ini kita senantiasa dituntut untuk menggunakan fasilitas mengajar yang memadai, karena situasi dan kondisi yang semakin modern akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk itu penulis akan mengemukakan tentang sarana dan prasarana di SDN No. 207 Taripa dalam hal ini sarana dan prasarana gedung dan fasilitas lainnya. Sarana tersebut di atas dapat digambarkan secara terperinci sebagai berikut :

Tabel 4.4

Sarana dan Prasarana SDN No. 207 Taripa
Tahun Ajaran 2010/2011

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Ruang Kepala Sekolah	1	Baik
2.	Ruang Guru	1	Baik
3.	Ruang Kelas	6	Baik
4.	Ruang WC	1	Baik
5.	Meja Guru	8	Baik
6.	Meja Siswa	182	Baik
7.	Kursi Guru	8	Baik
8.	Meja Siswa	182	Baik
9.	Lemari	9	Baik
10.	Rak Buku	3	Baik
11.	Papan Tulis	8	Baik
12.	Alat Peraga Siswa	20	Baik

Sumber data : Kantor SDN No. 207 Taripa (Papan potensi siswa tahun pelajaran 2010/2011).

Dengan melihat kondisi sarana dan prasarana tersebut di atas, maka dapat digambarkan bahwa dengan membandingkan dengan jumlah siswa yang ada di sekolah masih memerlukan sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna mendukung program pembelajaran untuk peserta didik terutama bagi siswa yang akan melakukan praktek dalam bidang studi tertentu, karena ini akan sangat memudahkan bagi siswa untuk lebih memberikan informasi yang efektif dan lebih efisien dalam memahami suatu mata pelajaran.

B. Pengaruh Komite Sekolah terhadap Peningkatan Bakat Siswa pada Bidang Studi Pendidikan Agama Islam di SDN Taripa Kecamatan Angkona

Seperti diketahui bahwa komite sekolah adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh para orang tua siswa yang diwadahi oleh guru di sekolah, tentunya akan menjadi mitra bagi sekolah tersebut dalam melakukan proses pengawasan terhadap proses pembelajaran di sekolah. Komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non-profit dan non-politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para *stakeholder* pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan. Penyederhanaan konsep masyarakat itu dilakukan melalui perwakilan fungsi *stakeholder*, dengan jalan membentuk komite sekolah pada setiap sekolah. Komite sekolah sedapat mungkin bisa mempresentasikan keragaman yang ada agar benar-benar dapat mewakili masyarakat.

Tabel 4.5

Tanggapan Siswa terhadap Keberadaan Komite Sekolah di SDN No. 207 Taripa

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat berpengaruh	33	60,00%
2.	Berpengaruh	14	25,45%
3.	Kurang berpengaruh	5	9,09%
4.	Tidak berpengaruh	3	5,45%
Jumlah		55	100%

Sumber data: Tabulasi Angket Item No. 1.

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa keberadaan komite sekolah pada SDN No. 207 Taripa senantiasa memberikan pengaruh yang relatif objektif dan

terbukti bahwa 33 siswa atau 60,00% siswa yang menjawab sangat berpengaruh, 14 siswa atau 25,45% yang menjawab berpengaruh, 5 siswa atau 9,09% yang menjawab kurang berpengaruh, dan 3 siswa atau 5,45% yang menjawab tidak berpengaruh. Dengan adanya hasil angket di atas membuktikan bahwa keberadaan komite sekolah sendiri ternyata sangat dibutuhkan oleh para anak didik dalam hal fungsi control dari pelaksanaan segala aktivitas pembelajaran serta aktivitas pendidikan yang berlangsung di sekolah.

Keberadaan komite di sekolah sangatlah bermanfaat bagi para pelaku pendidikan, ini tentunya tidak terlepas dari peran dan tugas komite sekolah itu sendiri, dalam hal ini para komite sekolah selain mempunyai tugas dan tanggung jawab serta fungsinya terhadap proses pendidikan, komite sekolah juga merupakan mitra dari sekolah dalam mensosialisasikan segala kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemegang keputusan di sekolah, terutama lagi bagi peningkatan mutu pendidikan agama Islam.⁴

Selanjutnya dalam tabel berikut akan dijelaskan tanggapan para responden tentang peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan agama Islam yang diajarkan oleh para tenaga pendidik di sekolah.

⁴ Amiruddin, Ketua Komite Sekolah, *Wawancara*, di Desa Taripa, tgl. 05 April 2011.

Tabel 4.6

Tanggapan Siswa terhadap Peran Komite Sekolah dalam Peningkatan Bakat Siswa pada Bidang Studi PAI

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat berperan	32	58,18%
2.	Berperan	13	23,64%
3.	Kurang berperan	9	16,36%
4.	Tidak berperan	1	1,82%
Jumlah		55	100%

Sumber data: Tabulasi Angket Item No. 2

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa peran komite sekolah dalam peningkatan bakat siswa pada bidang studi PAI senantiasa memberikan peran yang cukup signifikan, terbukti bahwa 32 siswa atau 58,18% siswa yang menjawab sangat berperan, 13 siswa atau 23,64% yang menjawab berperan, 9 siswa atau 16,36% yang menjawab kurang berperan, dan 1 siswa atau 1,82% yang menjawab tidak berperan. Dengan adanya hasil angket di atas membuktikan bahwa dalam peran aktif komite sekolah dalam peningkatan bakat siswa pada bidang studi PAI termasuk dalam kategori sangat berperan.

Dalam melaksanakan garis-garis besar program pendidikan, komite sekolah sebagai pengawas dalam proses pendidikan agama Islam harus memahami hal-hal yang berkaitan dengan tujuan materi, pendekatan, metode dan penilaian. Di samping itu guru pendidikan agama harus menguasai sepenuhnya program tahunan, program catur wulan, analisis materi pelajaran, satuan pelajaran dan sebagainya.

Tabel 4.7

Tanggapan Siswa terhadap Pelaksanaan Peran dan Fungsi Komite Sekolah dalam Peningkatan Bakat Siswa pada Bidang Studi PAI

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat efektif	28	50,91%
2.	Efektif	13	23,64%
3.	Kurang efektif	10	18,18%
4.	Tidak efektif	4	7,27%
Jumlah		55	100%

Sumber data: Tabulasi Angket Item No. 3

Dari tabel di atas, menunjukkan pelaksanaan peran dan fungsi komite sekolah dalam peningkatan bakat siswa pada bidang studi PAI senantiasa memberikan peran yang cukup bervariasi, terbukti bahwa 28 siswa atau 50,91% siswa yang menjawab sangat efektif, 13 siswa atau 23,64% yang menjawab efektif, 10 siswa atau 18,18% yang menjawab kurang efektif, dan 4 siswa atau 7,27% yang menjawab tidak efektif. Dengan adanya hasil angket tersebut membuktikan bahwa dalam pelaksanaan peran aktif komite sekolah sebagai fungsi control pengawasan dalam peningkatan bakat siswa pada bidang studi PAI termasuk dalam kategori sangat efektif.

Selanjutnya menurut Jamaluddin selaku sekretaris komite sekolah, bahwa kegiatan belajar juga berkenaan dengan proses mental, seperti yang terdapat dalam proses belajar melalui bertanya, bertindak, mencari penyelesaian/pemecahan, menemukan problem, menganalisis, membuat sintesis, berfikir, menghasilkan/

memproduksi, menyusun, menciptakan, mengharap, mengeksperimenkan, mengkritik, merancang, serta mengevaluasi dan menghubungkan.⁵

Berbagai kegiatan yang dilakukan siswa setelah melalui suatu proses belajar tersebut, diharapkan terjadi perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap, keterampilan, pengetahuan pada diri siswa sebab rangkaian kegiatan dalam belajar itu adalah bertujuan dengan satu maksud bahwa dalam situasi formal di sekolah belajar tidak dapat dipisahkan dengan mengajar. Oleh karena itu, belajar bertujuan juga memanusiakan manusia yang ditandai dengan hubungan sesama manusia, hubungan dengan lingkungan sekitar, serta hubungan dengan Allah swt., dalam rangka meningkatkan kualitas hidup. Dalam petunjuk pendidikan agama Islam pada sekolah umum dikemukakan bahwa salah satu kepingan pelaksanaannya ialah kurangnya keterpaduan antara tiga lingkungan pendidikan yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat.

Tabel 4.8

Komite Sekolah Mempunyai Pengaruh yang Positif bagi Proses Pendidikan Agama Islam di Sekolah

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat berpengaruh	35	63,64%
2.	Berpengaruh	14	25,45%
3.	Kurang berpengaruh	5	9,09%
4.	Tidak berpengaruh	1	1,82%
Jumlah		55	100%

Sumber data: Tabulasi Angket Item No. 4

⁵ Jamaluddin, Sekretaris Komite Sekolah, *Wawancara*, di Desa Taripa, tgl. 05 April 2011.

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa keberadaan komite sekolah dalam peningkatan bakat siswa pada bidang studi PAI mempunyai pengaruh yang relatif bagus, terbukti bahwa 35 siswa atau 63,64% siswa yang menjawab sangat berpengaruh, 14 siswa atau 25,45% yang menjawab berpengaruh, 5 siswa atau 9,09% yang menjawab kurang berpengaruh, dan 1 siswa atau 2,82% yang menjawab tidak berpengaruh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sekalipun komite sekolah adalah bukan merupakan tenaga pengajar di sekolah, akan tetapi komite sekolah yang berperan sebagai pengawas dalam proses pembelajaran di sekolah, juga mampu mempunyai pengaruh yang positif terhadap peningkatan mutu pendidikan agama Islam.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, maka dapat disepakati bersama bahwa peranan proses belajar cukup memegang peranan yang sangat penting. Belajar di sekolah senantiasa tidak berhasil secara mulus karena adanya hal-hal yang sering mengakibatkan kegagalan atau gangguan dalam pencapaian hasil perbuatan belajar. Hambatan tersebut dapat dianggap hal yang berada di luar kekuasaan untuk dihindari adanya, dan tidak seorang pun yang tidak mengalami dalam kehidupannya. Besar kecilnya hambatan itu sebenarnya sangat relatif, tergantung pada individu yang mengalami.

Tabel 4.9

Apakah Keberadaan Komite Sekolah Mampu Memberikan Dukungan Terhadap Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat berpengaruh	40	72,73%
2.	Berpengaruh	13	23,64%
3.	Kurang berpengaruh	2	3,64%
4.	Tidak berpengaruh	0	0,00%
Jumlah		55	100%

Sumber data: Tabulasi Angket Item No. 5

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa keberadaan komite sekolah dalam peningkatan bakat siswa pada bidang studi PAI mempunyai pengaruh yang positif, terbukti bahwa 40 siswa atau 72,72% siswa yang menjawab sangat berpengaruh, 13 siswa atau 23,64% yang menjawab berpengaruh, 2 siswa atau 3,64% yang menjawab kurang berpengaruh, dan tidak ada siswa atau 0,00% yang menjawab tidak berpengaruh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sekalipun komite sekolah adalah bukan merupakan tenaga pengajar di sekolah, akan tetapi komite sekolah yang berperan sebagai pengawas dalam proses pembelajaran di sekolah, juga mampu mempunyai pengaruh yang positif terhadap peningkatan mutu pendidikan agama Islam.

IAIN PALOPO

Sedangkan dengan itu, maka kegiatan belajar pendidikan agama meliputi interaksi belajar mengajar yang berlangsung baik di dalam kelas dan lingkungan sekolah, maupun di luar sekolah melalui kegiatan *intrakurikuler*, *kokurikuler*, dan *ekstrakurikuler*.

Para komite sekolah pada prinsipnya tidak terlibat secara langsung dalam upaya pencerdasan kehidupan bangsa, komite sekolah hanya mempunyai peranan dan diharapkan dapat memberikan sumbangan besar bagi kemajuan dari proses belajar yang diterapkan di sekolah tersebut. Guru mempunyai tugas untuk melakukan hal-hal yang sangat penting, yaitu memberikan perhatian kepada siswa secara perorangan dan komite terbatas pada pengawasan dari program tersebut.

Tabel 4.10

Apakah Komite Sekolah Sebagai Pengawas
Proses Pendidikan Agama Islam di Sekolah

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat aktif	37	62,27%
2.	Aktif	15	27,27%
3.	Kurang Aktif	2	3,64%
4.	Tidak aktif	1	1,82%
Jumlah		55	100%

Sumber data: Tabulasi Angket Item No. 6

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa keaktifan komite sekolah sebagai pengawas terhadap pola pembelajaran di sekolah utamanya mata pelajaran pendidikan agama Islam mempunyai tanggapan yang beragam, terbukti bahwa 37 siswa atau 62,27% siswa yang menjawab sangat aktif, 15 siswa atau 27,27% yang menjawab aktif, 2 siswa atau 3,64% yang menjawab kurang aktif, dan 1 siswa atau 1,82% yang menjawab tidak aktif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komite sekolah memang bukanlah sebagai pendidik di sekolah, akan tetapi keaktifan para komite sekolah sebagai pengawas dalam proses pembelajaran di sekolah, juga

mampu mempunyai pengaruh yang positif terhadap peningkatan mutu pendidikan agama Islam, karena tidak lepas dari sejahmana keaktifan para komite tersebut dalam memberikan sumbangsih pendidikan terhadap proses pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di sekolah menempatkan anak sebagai subjek belajar. Dalam kegiatan belajar tersebut, anak didik berinteraksi dengan lingkungannya yang merupakan upaya perubahan tingkah laku dengan serangkaian kegiatan, seperti membaca, mendengar, mengamati, meniru dan lain sebagainya. Karena itu, seorang pendidik sedapat mungkin memahami hakikat siswanya, yaitu anak yang sedang tumbuh dan berkembang. Baik secara fisik maupun psikologi untuk mencapai tujuan pendidikannya melalui suatu lembaga pendidikan, karena kesalahan dalam memahami hakekat siswa dapat menjadikan kegagalan pendidikan secara keseluruhan.

Selanjutnya Ernawati mengatakan bahwa pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuan, kecerdasan, bakat, minat dan kecepatannya. Namun dalam kenyataannya sering terjadi bahwa perbedaan-perbedaan kemampuan, kecerdasan, bakat, minat, latar belakang dan lingkungan fisik serta sosial masing-masing siswa, maka kemajuan belajar siswa-siswa yang setingkat (sekelas) mungkin tidak sama, ada siswa yang cepat, yang biasa dan lambat, ini tidak terlepas juga dari peran seorang komite sekolah dalam membantu proses pendidikan yang berlangsung, apakah dari pola pengajaran yang masih keliru ataukah memang

standarisasi dari sekolah tersebut dalam pengambilan nilai atau hasil dari pada pendidikan yang berlangsung.⁶

Dengan demikian pelaksanaan pembelajaran yang berjalan di sekolah juga tidak terlepas dari fungsi pengawasan dari para komite sekolah, sekalipun komite sekolah bukanlah suatu instansi yang berperan secara langsung untuk mengajar suatu materi pelajaran kepada para siswa, akan tetapi komite sekolah juga tidak lepas dari pengawasan yang relatif ekstra terhadap para pelaku pendidikan dan tentunya juga akan meningkatkan mutu pelajaran pendidikan yang diajarkan di sekolah.

C. Proses Penetapan Kebijakan Kurikulum di SDN No. 207 Taripa Kecamatan Angkona

Mutu pendidikan adalah suatu proses pengembangan kemampuan kearah yang diinginkan organisasi yang bersangkutan. Pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Ada tiga faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan yaitu : kebijakan dan pendidikan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan *educational production function* atau input-input analisis yang tidak Consisten; 2)

⁶ Ernawati, Bendahara Komite Sekolah, *Wawancara*, di Desa Taripa, tgl. 05 April 2011.

penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik; 3) peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan sangat minim.⁷

Berdasarkan penyebab tersebut dan dengan adanya era otonomi daerah yang sedang berjalan maka kebijakan strategis yang diambil Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam meningkatkan mutu pendidikan untuk mengembangkan SDM adalah : (1) Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (*school based management*) dimana sekolah diberikan kewenangan untuk merencanakan sendiri upaya peningkatan mutu secara keseluruhan; (2) Pendidikan yang berbasiskan pada partisipasi komunitas (*community based education*) di mana terjadi interaksi yang positif antara sekolah dengan masyarakat, sekolah sebagai *community learning center*; dan (3) Dengan menggunakan paradigma belajar atau *learning paradigma* yang akan menjadikan pelajar-pelajar atau *learner* menjadi manusia yang diberdayakan.⁸

Selain itu pada tanggal 2 Mei 2002, bertepatan hari pendidikan nasional, pemerintah telah mengumumkan suatu gerakan nasional untuk peningkatan mutu pendidikan, sekaligus menghantar perluasan pendekatan *Broad Base Education System (BBE)* yang memberi pembekalan kepada pelajar untuk siap bekerja membangun keluarga sejahtera.⁹

⁷ S.P., Sianipar, *Perencanaan Peningkatan Kinerja*, (Bahan Diklat Spoma), (Jakarta: LAN, 1989), h. 39.

⁸ Depdiknas, *Panduan Manajemen Sekolah*, (Jakarta: Depdikbud, 1999), h. 55.

⁹ *Ibid.*, h. 17.

Dengan pendekatan itu setiap siswa diharapkan akan mendapatkan pembekalan *life skills* yang berisi pemahaman yang luas dan mendalam tentang dukungan dan kemampuannya agar akrab dan saling memberi manfaat. Lingkungan sekitarnya dapat memperoleh masukan baru dari insan yang mencintainya, dan lingkungannya dapat memberikan topangan hidup yang mengantarkan manusia yang mencintainya menikmati kesejahteraan dunia akhirat.¹⁰

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa Peningkatan Mutu memiliki prinsip:

1. Peningkatan mutu harus dilaksanakan di sekolah
2. Peningkatan mutu hanya dapat dilaksanakan dengan adanya kepemimpinan yang baik
3. Peningkatan mutu harus didasarkan pada data dan fakta baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif
4. Peningkatan mutu harus memberdayakan dan melibatkan semua unsur yang ada di sekolah
5. Peningkatan mutu memiliki tujuan bahwa sekolah dapat memberikan kepuasan kepada siswa, orang tua dan masyarakat. (*Hand out*, pelatihan calon kepala sekolah).¹¹

Adapun penyusunan program peningkatan mutu dengan mengaplikasikan empat teknik : a) *school review*, b) *benchmarking*, c) *quality assurance*, dan d)

¹⁰ *Ibid.*, h. 44.

¹¹ *Ibid.*, h. 25.

quality control. Berdasarkan “*Panduan Manajemen Sekolah*” dijelaskan sebagai berikut :

a. School review

Suatu proses dimana seluruh komponen sekolah bekerja sama khususnya dengan orang tua dan tenaga profesional (ahli) untuk mengevaluasi dan menilai efektivitas sekolah, serta mutu lulusan. *School review* akan menghasilkan rumusan tentang kelemahan-kelemahan, kelebihan-kelebihan dan prestasi siswa, serta rekomendasi untuk pengembangan program tahun mendatang.

b. Benchmarking

Suatu kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu. *Benchmarking* dapat diaplikasikan untuk individu, kelompok ataupun lembaga.

c. Quality assurance

Suatu teknik untuk menentukan bahwa proses pendidikan telah berlangsung sebagaimana seharusnya. Dengan teknik ini akan dapat dideteksi adanya penyimpangan yang terjadi pada proses. Teknik menekankan pada monitoring yang berkesinambungan, dan melembaga, menjadi subsistem sekolah.

d. Quality control

Suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar. *Quality control* memerlukan indikator kualitas yang jelas dan pasti, sehingga dapat ditentukan penyimpangan kualitas yang terjadi. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme. Profesionalisme dibangun

melalui penguasaan kompetensi-kompetensi yang secara nyata diperlukan dalam menyelesaikan pekerjaan.¹²

Dengan demikian peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan mengarah pada pengelolaan pendidikan berbasis sekolah dengan memberi kepercayaan yang lebih luas kepada sekolah untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia bagi tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan. Pemerataan pelayanan pendidikan mengarah pada pendidikan yang berkeadilan, hal ini berkenaan dengan formula pembiayaan pendidikan yang adil dan transparan, upaya pemerataan mutu pendidikan dengan adanya standar kompetensi minimal serta pemerataan standar pelayanan pendidikan bagi siswa pada semua lapisan masyarakat.

Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme. Profesionalisme dibangun melalui penguasaan kompetensi-kompetensi yang secara nyata diperlukan dalam menyelesaikan pekerjaan.¹³

Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan di mana guru sebagai pemegang peranan penting dan utama, terutama dengan adanya perkembangan baru terhadap pandangan belajar mengajar, membawa konsekuensi kepada guru untuk meningkatkan kompetensinya dalam proses belajar mengajar dan hasil belajar siswa sebagian besar ditentukan oleh peranan guru dan kompetensi guru.

¹² Nurkholis, *Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model, dan Aplikasi*, (Jakarta: Gramedia, 2003), h. 64.

¹³ Depdikbud, *Kurikulum Sekolah Dasar Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP)*, (Jakarta: Depdikbud, 1983), h. 51.

Dalam proses perkembangan anak dari sejak lahir hingga dewasa terdapat perbedaan sifat-sifat pada umur tertentu antara satu dengan lainnya, yakni perkembangan anak usia, dini khususnya berbeda dengan pada masa kanak-kanak, atau masa dewasa dan lain sebagainya. Di dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik maupun secara psikis mempunyai perbedaan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya atau memiliki tempo dan irama perkembangan yang berbeda. Misalnya pada proses pertumbuhan pada anak usia yang sama kadang memiliki proses pertumbuhan yang berbeda, ada yang cepat besar, tinggi, gemuk dan sebaliknya juga ada yang kurus, tinggi, pendek kecil dan sebagainya dan begitu pula pada proses perkembangan anak itu juga berbeda yakni dengan memiliki tingkat intelegensi, kecakapan, cara menangkap pelajaran yang diajarkan juga berbeda dan lain sebagainya.

Dengan serangkaian metode yang telah diterapkan tersebut nantinya akan memberikan hasil yang maksimal yang tentunya peran komite sekolah akan sangat berperan dalam hal peningkatan inovasi pembelajaran yang akan memaksimalkan hasil belajar siswa.

Seperti diketahui bahwa komite sekolah adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh para orang tua siswa yang diwadahi oleh guru di sekolah, tentunya akan menjadi mitra bagi sekolah tersebut dalam melakukan proses pengawasan terhadap proses pembelajaran di sekolah. Komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non-profit dan non-politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para *stakeholder* pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari

berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan. Penyederhanaan konsep masyarakat itu dilakukan melalui perwakilan fungsi stakeholder, dengan jalan membentuk komite sekolah pada setiap sekolah. Komite sekolah sedapat mungkin bisa mempresentasikan keragaman yang ada agar benar-benar dapat mewakili masyarakat.

D. Pengaruh Komite Sekolah dalam Proses Penetapan Kebijakan di SDN No. 207 Taripa Kecamatan Angkona

Peran komite sekolah yang berada di suatu lembaga sekolah tidak terlepas dari fungsi kepemimpinan melekat pada seorang supervisor karena dialah pemimpin. Begitu pula pengawasan komite karena pada hakekatnya supervisor adalah pengawas yang tugas pokoknya melakukan pengawasan. Lebih terperinci dikemukakan fungsi pengawasan komite sekolah adalah sebagai berikut:

1. Dalam fungsi kepemimpinan, seorang pengawas hendaknya melakukan hal-hal sebagai berikut; (a) meningkatkan semangat kerja kepala sekolah, guru dan seluruh staf sekolah yang berada di bawah tanggungjawab dan kewenangannya, (b) mendorong aktivitas dan kreativitas serta dedikasi seluruh personil sekolah, (c) mendorong terciptanya suasana kondusif di dalam dan di luar lingkungan sekolah, (d) menampung, melayani dan mengakomodir segala macam keluhan guru di sekolah dan berusaha membantu pemecahannya, (e) membantu mengembangkan kerja sama dan kemitraan kerja dengan semua unsur terkait, (f) membantu mengembangkan kegiatan intra dan ekstra kurikuler di sekolah, (g) membimbing dan mengarahkan

seluruh personil sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran pada sekolah tersebut, (h) menampilkan sikap keteladanan sebagai pengawas, (i) menampilkan sikap seorang pemimpin yang demokratis, (j) harus memiliki komitmen yang tinggi bahwa kepala sekolah, guru dan staf sekolah bukan bawahan, akan tetapi merupakan mitra kerja.¹⁴

Tabel 4.11

Apakah Komite Sekolah Mampu Memberikan Pengaruh Terhadap Kinerja Para Pelaku Pendidikan di Sekolah

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat berpengaruh	26	47,27%
2.	Berpengaruh	20	36,36%
3.	Kurang berpengaruh	8	14,55%
4.	Tidak berpengaruh	1	1,82%
Jumlah		55	100%

Sumber data: Tabulasi Angket Item No. 7

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa keberadaan komite sekolah dalam peningkatan bakat siswa pada bidang studi PAI mempunyai pengaruh yang relatif bagus, terbukti bahwa 26 siswa atau 47,27% siswa yang menjawab sangat berpengaruh, 20 siswa atau 36,36% yang menjawab berpengaruh, 8 siswa atau 14,55% yang menjawab kurang berpengaruh, dan 1 siswa atau 1,82% yang menjawab tidak berpengaruh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sekalipun komite sekolah adalah bukan merupakan tenaga pengajar di sekolah, akan tetapi tugas dan peran seorang komite sekolah yang berperan sebagai pengawas dalam proses

¹⁴ Sudibyo, *Sistem Pengawasan Komite Sekolah*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 1999), h. 50.

pembelajaran di sekolah, juga mampu memberikan dampaknya kepengawasannya terhadap kinerja para guru dan pelaku pendidikan yang ada di sekolah tersebut.

2. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, seorang pengurus komite sekolah hendaknya memperhatikan hal-hal; (a) mengamati dengan sungguh-sungguh pelaksanaan tugas kepala sekolah, guru dan staf sekolah sehingga diketahui dengan jelas apakah tugas yang dilaksanakan itu sesuai dengan rencana atau tidak, (b) memantau perkembangan pendidikan dan pengajaran di sekolah yang menjadi tanggungjawab dan kewenangannya, termasuk kemajuan belajar siswa pada sekolah bersangkutan, (c) melaksanakan pelaksanaan administrasi sekolah secara keseluruhan yang di dalamnya terdapat kegiatan administrasi personil, materil, dan kurikulum, (d) mengendalikan penggunaan dan pendistribusian serta pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah tersebut, (e) mengawasi dengan seksama sebagai kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, terutama dalam rangka melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, (f) di samping mengawasi, para pengawas juga melaksanakan fungsi penilaian dan pembinaan terhadap berbagai aspek yang menjadi tugas pokoknya.¹⁵

Hal tersebut dapat dikembangkan melalui pengamalan pembelajaran dan penjabaran yang efektif di lingkungan sekolah, sehingga mampu melahirkan apa yang sebelumnya telah menjadi sasaran yang ingin dicapai. Berikut dapat dilihat dalam tabel, yakni sebagai berikut :

¹⁵ *Ibid.*, h. 52.

Tabel 4.12

Apakah Komite Sekolah dalam Melaksanakan Fungsinya Sebagai Pengawas dalam Memberikan Pengaruh Terhadap Kinerja para Pelaku Pendidikan di Sekolah

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat berpengaruh	30	54,55%
2.	Berpengaruh	15	27,27%
3.	Kurang berpengaruh	8	14,55%
4.	Tidak berpengaruh	2	3,64%
Jumlah		55	100%

Sumber data: Tabulasi Angket Item No. 8

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa komite sekolah dalam pelaksanaan fungsinya sebagai bagian dari pengawas pendidikan, peningkatan bakat siswa pada bidang studi PAI mempunyai pengaruh yang relatif bagus, terbukti bahwa 30 siswa atau 54,55% siswa yang menjawab sangat berpengaruh, 15 siswa atau 27,27% yang menjawab berpengaruh, 8 siswa atau 14,55% yang menjawab kurang berpengaruh, dan 2 siswa atau 3,64% yang menjawab tidak berpengaruh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sekalipun komite sekolah adalah bukan merupakan tenaga pengajar di sekolah, akan tetapi tugas dan peran seorang komite sekolah yang berperan sebagai pengawas dalam proses pembelajaran di sekolah, juga mampu memberikan dampaknya kepengawasannya terhadap kinerja para guru dan pelaku pendidikan yang ada di sekolah tersebut.

3. Dalam melaksanakan fungsi pelaksana, seorang personil komite sekolah hendaknya memperhatikan kegiatan-kegiatan sebagai berikut; (a) melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (b) mengamankan berbagai

kebijaksanaan yang telah ditetapkan, (c) melaporkan hasil pengawasan kepada pejabat yang berwenang untuk dianalisis dan ditindaklanjuti.¹⁶

Tabel 4.13

Apakah Pelaksanaan Fungsi dan Tanggung Jawab Komite Sekolah sesuai dengan Aturan dan Ketentuan yang Berlaku untuk para Pelaksana Komite Sekolah

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat Relevan	30	54,55%
2.	Relevan	19	34,55%
3.	Kurang Relevan	5	9,09%
4.	Tidak Relevan	1	1,82%
Jumlah		55	100%

Sumber data: Tabulasi Angket Item No. 9

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa komite sekolah dalam kesesuaian dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di sekolah, pelaksanaan fungsinya sebagai bagian dari pengawas pendidikan sudah, peningkatan bakat siswa pada bidang studi PAI mempunyai pengaruh yang relatif bagus, terbukti bahwa 30 siswa atau 54,55% siswa yang menjawab sangat relevan, 19 siswa atau 34,55% yang menjawab relevan, 5 siswa atau 9,09% yang menjawab kurang relevan, dan 1 siswa atau 1,82% yang menjawab tidak relevan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sekalipun komite sekolah adalah bukan merupakan tenaga pengajar di sekolah, akan tetapi tugas dan peran seorang komite sekolah yang berperan sebagai pengawas dalam proses pembelajaran di sekolah, juga mampu memberikan dampaknya kepengawasannya terhadap kinerja para guru dan pelaku pendidikan yang ada di sekolah tersebut, dalam

¹⁶ *Ibid.*, h. 53.

pelaksanaan kinerja dan tanggung jawabnya sudah sesuai dengan kerelevansian aturan dan ketentuan yang sudah ada.

Dengan demikian komite sekolah sebagai lembaga yang terbentuk dari luar sekolah dan bukan merupakan suatu lembaga formal yang menjadi lembaga penentu terhadap proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah, akan tetapi komite sekolah dalam hal ini adalah mempunyai peran dan tanggungjawab yang lewat pengawasan praktis terhadap pelaku pendidikan mampu meningkatkan mutu dan kualitas hasil dari proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah, dalam hal ini pengawasan terhadap objek pendidik atau guru dan kepala sekolah yang termasuk didalamnya kinerja dari masing-masing pelaku pendidikan tersebut, dengan demikian peran komite sekolah dalam peningkatan bakat siswa pada bidang studi PAI di SDN No. 207 Taripa sudah berjalan dengan efektif, tinggal peningkatan yang lebih signifikan guna menunjang dari program kerja yang telah diterapkan di sekolah tersebut.

Keberadaan komite di sekolah sangatlah bermanfaat bagi para pelaku pendidikan, ini tentunya tidak terlepas dari peran dan tugas komite sekolah itu sendiri, dalam hal ini para komite sekolah selain mempunyai tugas dan tanggung jawab serta fungsinya terhadap proses pendidikan, komite sekolah juga merupakan mitra dari sekolah dalam mensosialisasikan segala kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemegang keputusan di sekolah, terutama lagi bagi peningkatan mutu pendidikan agama Islam.¹⁷

¹⁷ Amiruddin, Ketua Komite Sekolah, "Wawancara", di Desa Taripa, Kec. Angkona, tgl. 05 April 2011.

Dalam melaksanakan garis-garis besar program pendidikan, komite sekolah sebagai pengawas dalam proses pendidikan agama Islam harus memahami hal-hal yang berkaitan dengan tujuan materi, pendekatan, metode dan penilaian. Di samping itu guru pendidikan agama harus menguasai sepenuhnya program tahunan, program catur wulan, analisis materi pelajaran, satuan pelajaran dan sebagainya.



IAIN PALOPO

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaruh komite sekolah terhadap peningkatan bakat siswa pada bidang studi Pendidikan Agama Islam di SDN No. 207 Taripa Kecamatan Angkona, sebab keberadaan komite di sekolah sangatlah bermanfaat bagi para pelaku pendidikan, ini tentunya tidak terlepas dari peran dan tugas komite sekolah itu sendiri, dalam hal ini para komite sekolah selain mempunyai tugas dan tanggung jawab serta fungsinya terhadap proses pendidikan, komite sekolah juga merupakan mitra dari sekolah dalam mensosialisasikan segala kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemegang keputusan di sekolah, terutama lagi bagi peningkatan mutu pendidikan agama Islam.

2. Proses penetapan kebijakan kurikulum di SDN No. 207 Taripa Kecamatan Angkona, sebab berdasarkan penyebab tersebut maka kebijakan strategis yang diambil dalam meningkatkan mutu pendidikan untuk mengembangkan SDM adalah : (1) Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (*school based management*) dimana sekolah diberikan kewenangan untuk merencanakan sendiri upaya peningkatan mutu secara keseluruhan; (2) Pendidikan yang berbasiskan pada partisipasi komunitas (*community based education*) di mana terjadi interaksi yang positif antara sekolah dengan masyarakat, sekolah sebagai *community learning*

center; dan (3) Dengan menggunakan paradigma belajar atau *learning paradigma* yang akan menjadikan pelajar-pelajar atau *learner* menjadi manusia yang diberdayakan.

3. Peran komite sekolah sekalipun bukan sebagai faktor penentu dalam proses belajar mengajar secara langsung di sekolah, akan tetapi komite sekolah sebagai lembaga yang bekerjasama dengan pihak sekolah senantiasa juga mengedepankan visi dan misi sekolah tersebut, dan juga tidak terlepas dari faktor kesiapan seorang pengurus komite sekolah tersebut, sejauhmana tingkat keprofesionalannya dalam meramu program kerja yang ditawarkan oleh sekolah dan mampu mengaplikasikan dalam pola kerja dari komite sekolah yang selanjutnya mampu disosialisasikan terhadap anak didik dan para orang tua siswa.

B. Saran - saran

Setelah menyimak dari kesimpulan di atas, maka berikut akan disampaikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut :

1. Kepada pengurus komite sekolah hendaknya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai seorang pengurus komite harus mampu mengembangkan program kerja yang ditawarkan sekolah agar senantiasa berjalan sesuai dengan rancangan pembelajaran yang telah dijadwalkan baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek.

2. Kepada para pengurus komite hendaknya dalam mengambil suatu kebijakan seyogyanya mampu berdiri diantara pihak sekolah dan pihak orang tua siswa dan

siswa itu sendiri, sebab mereka sebagai pengurus komite yang mempunyai peran sebagai jembatan yang objektif antara ketiganya harus mampu menempatkan pada posisi mana mereka berada agar tidak merugikan kepada salah satu pihak yang terlibat dalam pelaku pendidikan, akan tetapi justru dengan kehadiran para komite sekolah justru lebih mengeratkan hubungan diantara ketiganya.

3. Kepada para siswa agar senantiasa dalam pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah senantiasa lebih mengedepankan pola pembelajaran yang telah dijadwalkan oleh para guru dan komite sekolah, agar mampu mengembangkan profesional individu yang tentunya akan memberikan hasil yang lebih maksimal, tentunya ini kaitannya dengan pendidikan agama Islam.



IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

- Ametembun, N.A., *Guru dalam Administrasi Sekolah, Pembangunan*, Bandung: IKIP Bandung, 1989.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Burhanuddin, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1989.
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag. RI., 2000.
- Depdikbud, *Kurikulum Sekolah Dasar Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP)*, Jakarta: Depdikbud, 1983.
- Depdiknas, *Panduan Manajemen Sekolah*, Jakarta: Depdikbud, 1999.
- Dirjen Dikdasmen, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (Konsep Dasar Rencana dan Program Pelaksanaan, Panduan Monitoring dan Evaluasi, Pedoman Tata Krama dan Tata Tertib Pembelajaran dan Pengajaran Kontekstual)*, Jakarta: Depdiknas, 2002.
- , *Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2002.
- Dirjen Dikti, *UUD 1945*, Jakarta: 1988.
- Enoch, *Dasar-dasar Perencanaan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara; Fowler G., et.all, 1998.
- Furchan, Arief, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1984.
- Hallen A., *Bimbingan dan Konseling*, Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Margono, S., *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet. II; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.
- Moke FJ. dkk., *Psikologi Perkembangan*, Cet. IV; Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1984.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya 2002.

- Mulyasa, E., *Manajemen Berbasis Sekolah, (Konsep, Strategi dan Implementasi)*, Bandung: Rosda Karya, 2002.
- Nurcholis, *Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model, dan Aplikasi*, Jakarta: Gramedia, 2003.
- Nurkencana, Wahid, *Evaluasi Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1996.
- Nurkholis, *Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model, dan Aplikasi*, Jakarta: Gramedia, 2003.
- Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, No. 22 Tahun 2003 dan Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Rumtini dan Jiyono, *Menejemen Berbasis Sekolah: Konsep Kemungkinan Strategi Pelaksanannya di Indonesia, Cet. VI*; Jakarta: Gramedia, 2005.
- Salladien, *Ilmu Pengetahuan Sosial, Alternatif Model Pendidikan Berorientasi Dunia Kerja, Cet. I*; Jakarta: Pustaka Ilmu, 2002.
- Sanjaya, Wina, *Pembelajaran dalam Implementasi, Cet. V*; Jakarta, Pustaka Pelajar, 2009.
- Sardiman A., *Belajar Mengajar, Cet. IV*; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1986.
- Sianipar, S.P., *Perencanaan Peningkatan Kinerja, (Bahan Diklat Spoma)*, Jakarta: LAN, 1989.
- Soekidji, Notoatmodjo, *Pengembangan Suberdaya Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Sudibyo, *Sistem Pengawasan Komite Sekolah*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 1999.
- Sudijono, Anas, *Pengantar Statistik Pendidikan, Cet. III*; Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Cet. IV*; Bandung: CV. Alfabeta, 2008.
- Sukardi, Dewa Ketut, *Bimbingan dan Penyuluhan Belajar di Sekolah, Cet. IV*; Surabaya: Usaha Nasional, 1983.